



**DETERMINAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA
PEREMPUAN DI JAWA BARAT**

SKRIPSI

Oleh:

Musti Rahayu

220810101125

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

JEMBER

2026



**DETERMINAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA
PEREMPUAN DI JAWA BARAT**

*Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Ekonomi Pembangunan*

SKRIPSI

Oleh:

Musti Rahayu

220810101125

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

JEMBER

2026

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, kesehatan, serta kemudahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Dwi Sujanto dan Ibu Mery, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan, semangat, serta pengorbanan yang tiada henti kepada penulis.
2. Saudara kandung penulis, Nurul Erry, yang selalu memberikan dukungan, semangat, Doa dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Teman-teman seperjuangan yang selalu menemani, membantu, dan memberikan semangat selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala kebaikan, dukungan, dan doa yang diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Aamiin.

MOTTO

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa: *“Fa inna ma’al – ‘usri yusra, Inna ma’al – usri yusra.”*

Setiap kesulitan pasti ada kemudahan”

- (TQS. Al – Insyirah 94: 5-6)

“Apabila yang ada di depan membuatmu takut, dan yang dibelakang membuatmu luka, lihatlah keatas, sungguh Allah tidak pernah gagal menolongmu.”

- Penulis



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Musti Rahayu

NIM : 220810101125

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Jawa Barat adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 Juli 2026

Yang menyatakan,

Musti Rahayu

220810101125

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi berjudul *Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Jawa Barat* telah diuji dan disetujui oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 1 Juli 2026

Tempat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Pembimbing:

Tanda Tangan

1. Pembimbing Utama:

Nama : Prof. Dr. Mohammad Saleh, S.E., M.Sc (.....)

NIP : 195608311984031002

2. Pembimbing Anggota:

Nama : -

NIP : -

Penguji:

3. Penguji Utama:

Nama : Dr. Anifatul Hanim, M.Si (.....)

NIP : 196507301991032001

4. Penguji Anggota:

Nama : Dr. Yulia Indrawati, S.E., M. Si (.....)

NIP : 197707302001122003

**DETERMINAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA
PEREMPUAN DI JAWA BARAT**

Musti Rahayu

Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan, Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh UMK, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan perempuan, Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan perempuan, dan *dependency ratio* terhadap TPAK perempuan di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel pada sampel 25 kabupaten/kota di Jawa Barat selama tahun 2018–2024. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMK dan Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPAK perempuan. Artinya, kenaikan upah minimum dan kondisi Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan yang lebih baik dapat mendorong perempuan untuk lebih aktif masuk ke angkatan kerja. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan dan *dependency ratio* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TPAK perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan pekerjaan yang sesuai, sedangkan tingginya beban tanggungan keluarga dapat membatasi perempuan untuk bekerja. Berdasarkan hasil tersebut, pemerintah perlu meningkatkan penyediaan lapangan kerja yang sesuai dengan pendidikan perempuan, memperluas akses layanan kesehatan Perempuan, serta menyediakan fasilitas pendukung seperti penitipan anak dan kebijakan kerja fleksibel agar partisipasi kerja perempuan di Jawa Barat dapat meningkat.

Kata Kunci : Upah Minimum Kabupaten/Kota, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan, Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan, *Dependency ratio*, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, Jawa Barat.

***DETERMINANTS OF FEMALE LABOR FORCE PARTICIPATION IN
WEST JAVA***

Musti Rahayu

*Development Economics Study Program, Department of Economics and
Development Studies, Faculty of Economics and Business, University of Jember*

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of the Regency/City Minimum Wage (UMK), women's education, women's health, and dependency ratio on women's Labor Force Participation Rate (LFPR) in West Java Province. This study uses a quantitative approach with panel data from a sample of 25 regencies/cities in West Java during the period 2018–2024. The analytical method used is panel data regression with the Fixed Effect Model (FEM). The results show that UMK and health have a positive and significant effect on women's LFPR. This means that an increase in minimum wages and better health conditions can encourage women to participate more actively in the labor market. Meanwhile, education and dependency ratio have a negative and significant effect on women's LFPR. This indicates that the improvement in women's education has not been fully supported by the availability of suitable jobs, while a high family dependency burden can limit women's participation in work. Based on these findings, the government needs to increase the availability of jobs that match women's education levels, expand access to health services, and provide supporting facilities such as childcare services and flexible work policies to increase women's labor force participation in West Java.

Keywords: *Regency/City Minimum Wage, Education, Health, Dependency ratio, Female Labor Force Participation Rate, West Java.*

RINGKASAN

Determinants Of Female Labor Force Participation In West Java; Musti Rahayu; 220810101125; Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan, Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember.

Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan ekonomi dan pencapaian kesetaraan gender. Di Provinsi Jawa Barat, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai hambatan dalam berpartisipasi dalam angkatan kerja, baik yang berasal dari faktor ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun kondisi rumah tangga. Meskipun pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan terus mengalami peningkatan, keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja belum menunjukkan peningkatan yang sejalan. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat berbagai faktor yang memengaruhi keputusan perempuan untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan, Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan, dan Dependency Ratio terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Jawa Barat periode 2018–2024. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ekonomi ketenagakerjaan serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang mendukung peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan.

Penelitian ini menggunakan Teori Feminisme Liberal sebagai *grand theory* yang menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak, kesempatan, dan kemampuan yang setara dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, namun masih menghadapi berbagai hambatan sosial, budaya, dan ekonomi yang membatasi partisipasi mereka dalam angkatan kerja. Sebagai teori pendukung, penelitian ini menggunakan Teori Penawaran Tenaga Kerja Mincer (1962) untuk menjelaskan pengaruh upah terhadap keputusan perempuan berpartisipasi dalam

angkatan kerja, Teori Human Capital Becker (1964) untuk menjelaskan pengaruh pendidikan dan kesehatan terhadap kualitas sumber daya manusia, serta Teori Ekonomi Rumah Tangga Becker (1965) untuk menjelaskan pengaruh *dependency ratio* terhadap keputusan perempuan dalam mengalokasikan waktu antara aktivitas domestik dan aktivitas ekonomi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan metode regresi data panel. Unit analisis penelitian mencakup 25 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2018–2024. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan, sedangkan variabel independennya meliputi UMK, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan, Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan, dan Dependency Ratio. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman, model terbaik yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM), dengan pengolahan data menggunakan perangkat lunak EViews 12.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial UMK dan Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Jawa Barat. Sebaliknya, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan dan Dependency Ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TPAK perempuan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan perempuan belum sepenuhnya diikuti oleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, sedangkan tingginya *dependency ratio* meningkatkan beban domestik dan pengasuhan yang membatasi partisipasi perempuan dalam angkatan kerja.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu memperkuat keterkaitan antara pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja serta mengembangkan kebijakan yang mendukung keseimbangan antara kehidupan keluarga dan pekerjaan melalui penyediaan layanan pengasuhan dan dukungan terhadap pembagian peran domestik yang lebih setara sehingga partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dapat terus meningkat.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Jawa Barat”*. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan, Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mohammad Saleh, M.Sc., selaku dosen pembimbing utama yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan masukan yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Anifatul Hanim, M.Si., selaku dosen penguji utama yang telah memberikan evaluasi, kritik, dan saran yang sangat membangun sehingga penulis dapat menyempurnakan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Yulia Indrawati, S.E., M.Si., selaku dosen penguji anggota yang telah memberikan kritik, saran, serta motivasi yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Duwi Yunitasari, S.E., M.E., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan selama masa perkuliahan.
5. Bapak Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E., M.P., selaku Koordinator Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan Universitas Jember.
6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, serta seluruh civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Dwi Sujanto dan Ibu Mery, dan juga kakak kandung penulis, saudara Nurul Erry Sulistyaningruum Terima kasih atas segala pengorbanan, kerja keras, cinta, perhatian, serta dukungan yang tidak

pernah putus dalam setiap langkah kehidupan penulis. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan besarnya jasa dan ketulusan Bapak dan Ibu dalam mengantarkan penulis hingga berada pada titik ini. Skripsi ini merupakan salah satu wujud kecil dari doa, harapan, dan perjuangan yang telah Bapak dan Ibu perjuangkan selama ini.

8. Aditya Pratama yang senantiasa hadir sebagai sumber semangat dan tempat berbagi cerita selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas doa, perhatian, kesabaran, dukungan, serta kepercayaan yang tidak pernah putus dalam mendampingi penulis melewati berbagai tantangan selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Kehadiran, motivasi, dan ketulusan yang diberikan menjadi salah satu kekuatan bagi penulis untuk terus berusaha dan tidak menyerah.
9. Bapak Nadiri, Bapak Nono, beserta seluruh Operator Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan yang telah membantu dan memberikan pelayanan dengan penuh kesabaran selama proses administrasi penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, kemudahan, dan informasi yang diberikan, sehingga setiap tahapan administrasi skripsi dapat berjalan dengan baik dan lancar.
10. Dini Puspitasari, selaku kakak tingkat penulis yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi.
11. Sahabat-sahabat penulis, yaitu Nadya Galuh, Bayu Aji Pratama, Nasywa Widya, Amilatul Kholidah, Tiffany Dian Nissa, Sitiwani, Nandya Rachma, Arimbi Hayuningtyas, Damai Rizky, Visska Yunita, Gita Puspita Sari, dan Eka Trisnawati yang selalu memberikan dukungan, bantuan, dan selalu menemani proses penulis dari semester satu hingga semester akhir, yang menjadi tempat untuk berkeluh kesah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

DAFTAR ISI

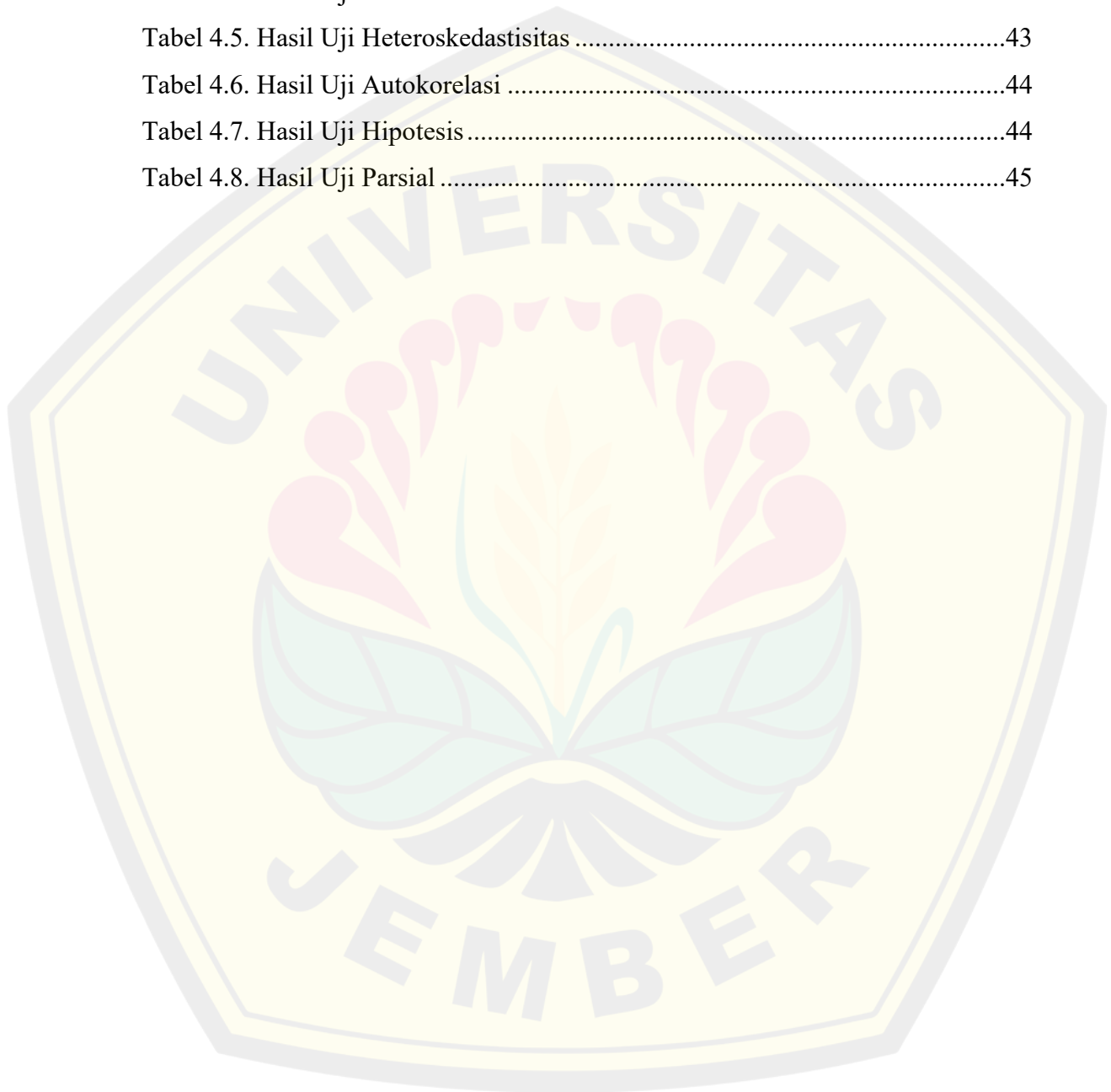
PERSEMBAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
RINGKASAN	ix
PRAKATA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Kajian Teoritis	8
2.1.1 Teori Feminisme Liberal (1792)	8
2.1.2 Teori Penawaran Tenaga Kerja	9
2.1.3 Teori Human Capital (Becker 1964)	11
2.1.4 Teori Ekonomi Rumah Tangga (Becker 1991)	13
2.1.5 Konsep Triple Burden Perempuan	17
2.2 Penelitian Terdahulu	19
2.3 Kerangka Konseptual.....	22
2.3.1 Hipotesis.....	23

BAB 3 METODE PENELITIAN	24
3.1 Rancangan Penelitian	24
3.1.1 Jenis Penelitian	24
3.1.2 Populasi dan Sampel	24
3.1.3 Unit Analisis	24
3.1.4 Objek Penelitian	24
3.1.5 Metode Pengumpulan Data	25
3.2 Metode Analisis	25
3.2.1 Analisis Data Panel	25
3.3 Metode Estimasi Regresi Data Panel	26
3.3.1 <i>Common Effect Model</i> (CEM)	26
3.3.2 <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	26
3.3.3 <i>Random Effect Model</i> (REM)	26
3.4 Uji Pemilihan Model	26
3.4.1 Uji Chow	26
3.4.2 Uji Hausman	27
3.4.3 Uji Lagrange Multiplier (LM)	27
3.5 Uji Asumsi Klasik	27
3.5.1 Uji Normalitas	27
3.5.2 Uji Multikolinieritas	27
3.5.3 Uji Heteroskedastisitas	28
3.5.4 Uji Autokorelasi	28
3.6 Uji Statistika	28
3.6.1 Uji F (Uji Simultan)	28
3.6.2 Uji t (Uji Parsial)	29
3.6.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	29
3.7 Definisi Operasional Variabel	29
BAB 4 PEMBAHASAN	31
4.1 Gambaran Umum	31
4.1.1 Kondisi Ekonomi di Provinsi Jawa Barat	31
4.1.2 Gambaran Umum Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat ...	32

4.2	Gambaran Umum Upah Minimum Kabupaten / Kota, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan, Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan dan <i>Dependency ratio</i> di Jawa Barat	34
4.2.1	Gambaran Umum Upah Minimum Kabupaten / Kota Jawa Barat	34
4.2.2	Gambaran Umum Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan di Jawa Barat	36
4.2.3	Gambaran Umum Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan di Jawa Barat	38
4.2.4	Gambaran Umum <i>Dependency ratio</i> di Jawa Barat	39
4.3	Hasil Analisis Penelitian	41
4.3.1	Uji Pemilihan Model Terbaik	41
4.3.2	Uji Asumsi Klasik	42
4.3.3	Hasil Uji Hipotesis Statistik	44
4.4	Pembahasan Hasil Analisis Perspektif Empiris dan Teoritis	47
4.4.1	Pengaruh Upah terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Jawa Barat	47
4.4.2	Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Jawa Barat	50
4.4.3	Pengaruh Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Jawa Barat	53
4.4.4	Pengaruh <i>Dependency Ratio</i> terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Jawa Barat	57
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN		60
5.1	Kesimpulan	60
5.2	Saran	61
DAFTAR PUSTAKA		63
LAMPIRAN		67

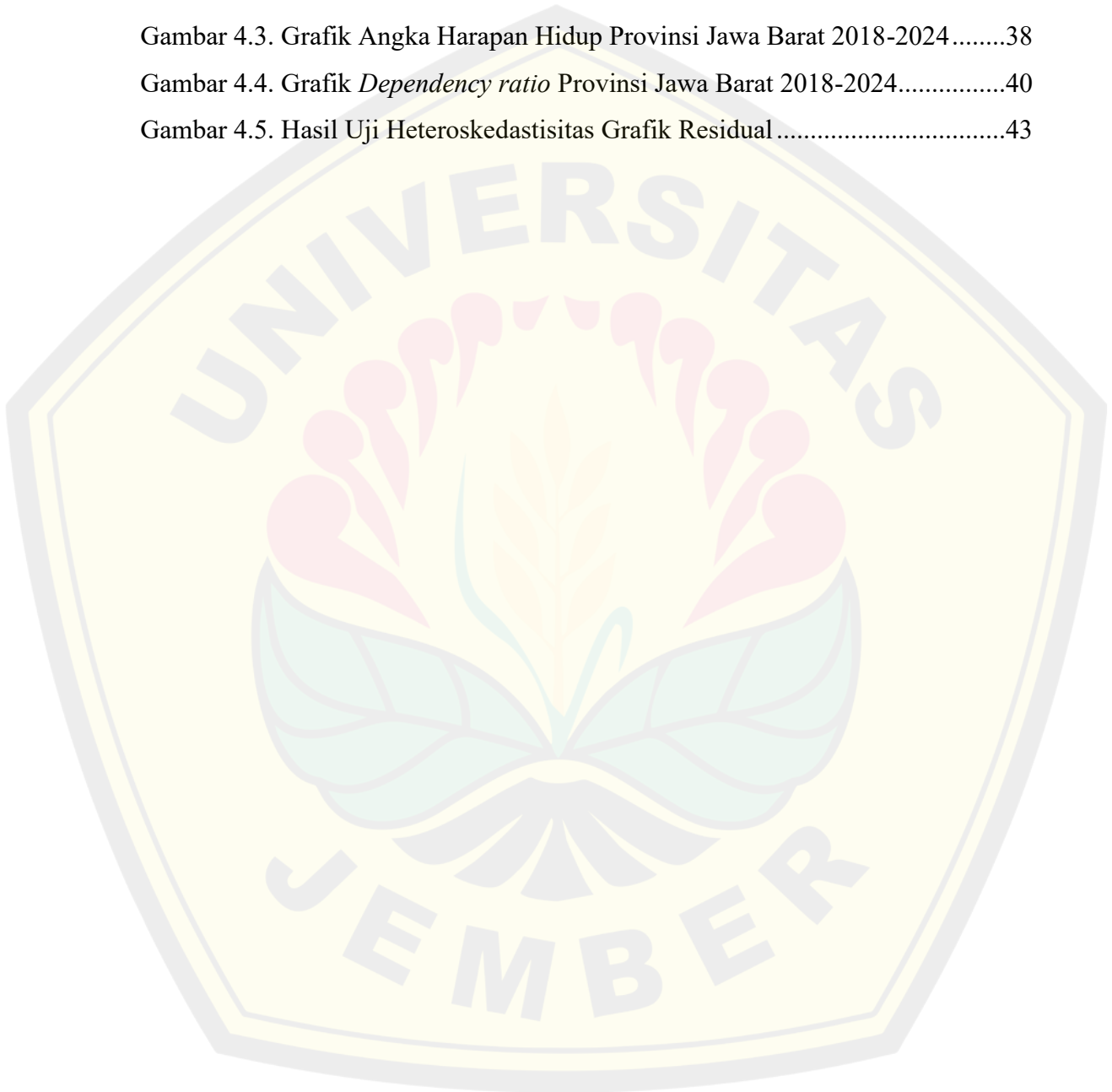
DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Hasil Uji Chow.....	41
Tabel 4.2. Hasil Uji Hausman.....	41
Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas	42
Tabel 4.4. Hasil Uji Multikolioneritas	42
Tabel 4.5. Hasil Uji Heteroskedastisitas	43
Tabel 4.6. Hasil Uji Autokorelasi	44
Tabel 4.7. Hasil Uji Hipotesis.....	44
Tabel 4.8. Hasil Uji Parsial	45



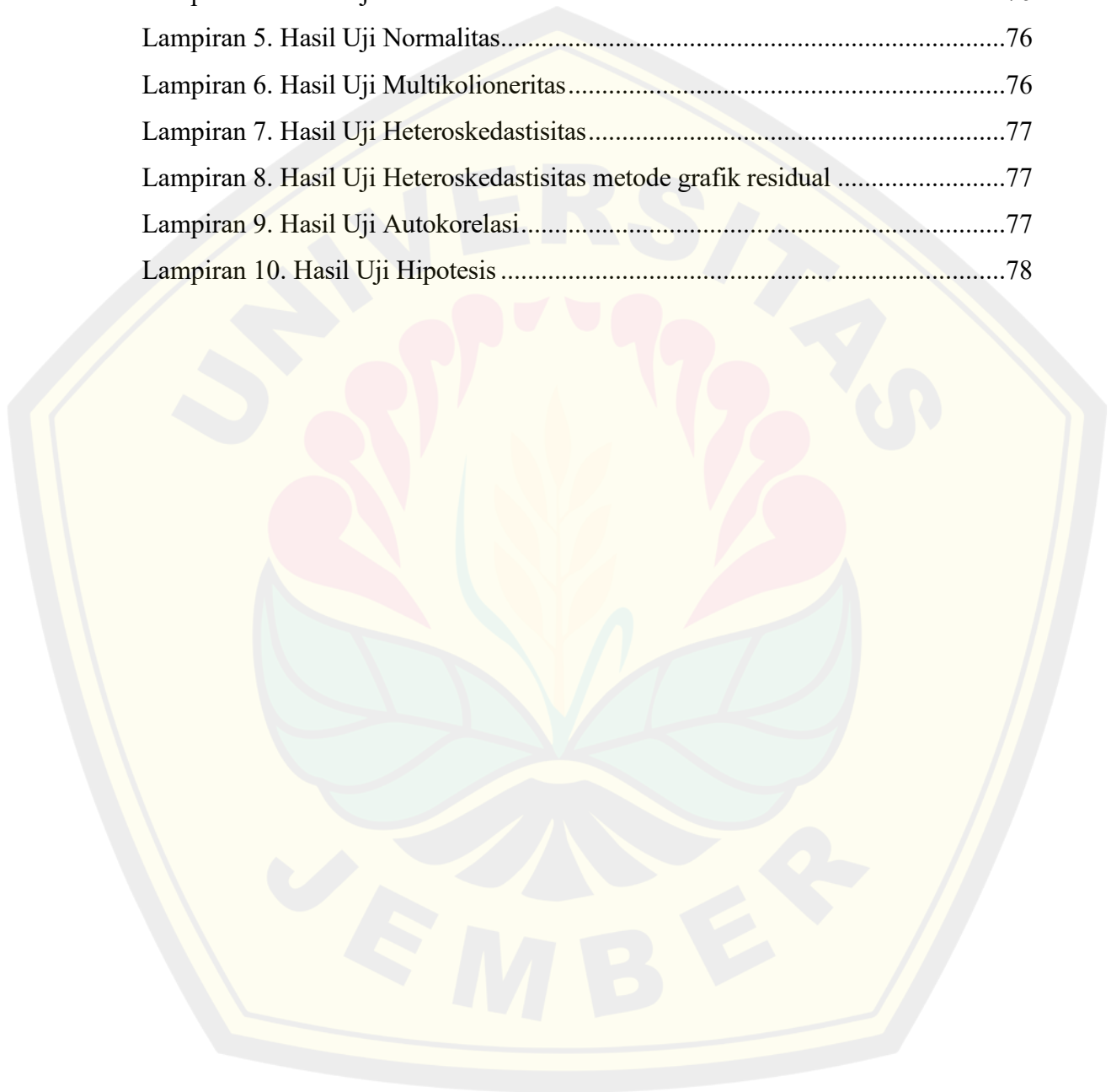
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. TPAK Perempuan di Jawa Barat tahun 2018 dan 2024	3
Gambar 2.1. Kerangka Konseptual	22
Gambar 4.1. Grafik Upah Minimum Provinsi Jawa Barat 2018-2024	35
Gambar 4.2. Grafik Rata – Rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Barat 2018-2024	37
Gambar 4.3. Grafik Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Barat 2018-2024	38
Gambar 4.4. Grafik <i>Dependency ratio</i> Provinsi Jawa Barat 2018-2024	40
Gambar 4.5. Hasil Uji Heteroskedastisitas Grafik Residual	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Penelitian Terdahulu	67
Lampiran 2. Data Penelitian	72
Lampiran 3. Hasil Uji Chow.....	76
Lampiran 4. Hasil Uji Hausman	76
Lampiran 5. Hasil Uji Normalitas.....	76
Lampiran 6. Hasil Uji Multikolineritas	76
Lampiran 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	77
Lampiran 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas metode grafik residual	77
Lampiran 9. Hasil Uji Autokorelasi.....	77
Lampiran 10. Hasil Uji Hipotesis	78



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketidaksetaraan gender dalam ketenagakerjaan masih menjadi persoalan global, termasuk di Indonesia. *Global Gender Gap Report 2024* menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-100 dari 146 negara, menurun dari peringkat ke-87 pada tahun sebelumnya, dengan skor 0,667 pada *dimensi Economic Participation and Opportunity*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan pasar tenaga kerja.

Ketenagakerjaan perempuan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan laki-laki. Perempuan umumnya menghadapi peran ganda antara pekerjaan dan tanggung jawab domestik sehingga keputusan untuk bekerja dipengaruhi oleh status perkawinan, keberadaan anak, jumlah tanggungan, dan pembagian pekerjaan rumah tangga. Perempuan juga cenderung bekerja pada sektor perdagangan, jasa, pertanian, UMKM, usaha keluarga, dan pekerjaan informal yang memiliki waktu kerja lebih fleksibel. Sebaliknya, sektor konstruksi, pertambangan, transportasi, pekerjaan teknis lapangan, dan industri berat masih banyak didominasi laki-laki karena tuntutan fisik, kondisi lingkungan kerja, persyaratan pekerjaan, dan anggapan sosial mengenai pembagian pekerjaan berdasarkan gender.

Karakteristik tersebut dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang membentuk perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat (Dwi Adika & Rahmawati, 2021). Tatanan sosial masyarakat Indonesia masih dipengaruhi oleh sejarah, tradisi, dan budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama, sedangkan perempuan lebih dikaitkan dengan pekerjaan domestik. Perempuan juga lebih rentan bekerja dalam pekerjaan informal, pekerjaan tidak tetap, pekerjaan paruh waktu, atau sebagai pekerja keluarga yang tidak dibayar. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian perempuan memiliki tingkat pendapatan, perlindungan sosial, keamanan kerja, dan peluang pengembangan karier yang lebih rendah. Perempuan juga menghadapi segregasi

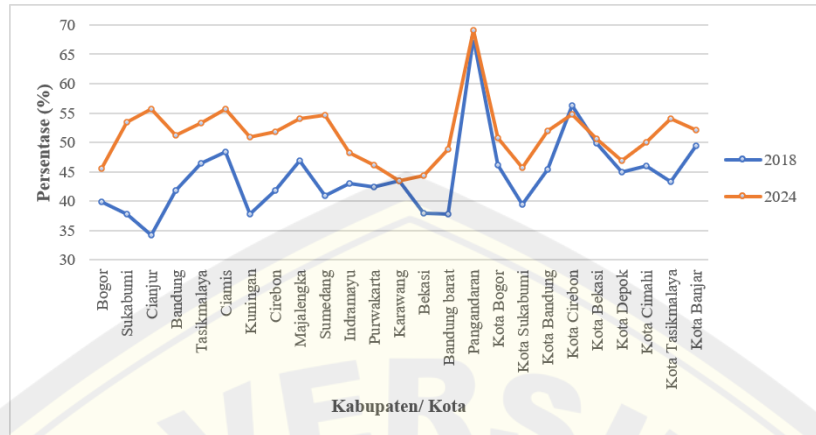
pekerjaan, yaitu pemisahan jenis pekerjaan berdasarkan gender. Perempuan sering ditempatkan pada pekerjaan administratif, pelayanan, pengasuhan, dan perawatan, sedangkan laki-laki lebih banyak menempati pekerjaan teknis, operasional, dan posisi pengambilan keputusan. Diskriminasi gender dalam ketenagakerjaan dapat muncul dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, kesenjangan upah, dan pembagian beban kerja yang tidak seimbang (Putri *et al*, 2025).

Fenomena ketimpangan partisipasi ekonomi perempuan tersebut sejalan dengan pandangan Feminisme Liberal yang menekankan pentingnya kesetaraan hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan (Wollstonecraft, 1792). Dalam bidang ketenagakerjaan, perempuan seharusnya memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan, memasuki angkatan kerja, memilih jenis pekerjaan, mendapatkan upah yang layak, mengembangkan karier, dan mengakses sumber daya ekonomi. Namun, kesetaraan secara formal belum selalu diikuti oleh kesetaraan dalam praktik karena perempuan masih menghadapi hambatan struktural, sosial dan budaya.

Salah satu bentuk ketidaksetaraan gender dapat dilihat dari rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan. Secara nasional, TPAK perempuan pada tahun 2024 hanya sebesar 56,42%, jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki yang mencapai 84,66%. Rendahnya partisipasi kerja perempuan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti beban ganda dalam rumah tangga, keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak, serta adanya stigma sosial yang menganggap perempuan kurang produktif dibandingkan laki-laki (Putri *et al*, 2025).

Ketidaksetaraan partisipasi kerja perempuan masih menjadi masalah di Jawa Barat, meskipun provinsi ini memiliki penduduk terbesar dan pertumbuhan ekonomi yang pesat di sektor industri, perdagangan, dan jasa. Pada 2018, TPAK perempuan hanya 42,25% dengan tingkat pengangguran 8,31% (Badan Pusat Statistik, 2018), yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menciptakan kesempatan kerja inklusif. Selama 2018–2024, TPAK perempuan juga berfluktuasi dan tidak merata antar kabupaten/kota, terutama akibat dampak pandemi dan pemulihan yang berbeda di setiap wilayah, meskipun

pemerintah telah menjalankan program pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas melalui RPJMD 2018–2023.



Gambar 1.1. TPAK Perempuan di Jawa Barat tahun 2018 dan 2024
Sumber: BPS data diolah, 2026

Perbedaan TPAK perempuan antarwilayah tersebut menunjukkan bahwa karakteristik daerah memiliki peran penting dalam membentuk keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja. Kabupaten Pangandaran, misalnya, memiliki TPAK perempuan tertinggi selama periode pengamatan. Kondisi ini dapat diindikasikan berkaitan dengan struktur ekonomi daerah yang banyak ditopang oleh sektor pariwisata, perdagangan kecil, pertanian, perikanan, UMKM, dan usaha keluarga. Sektor-sektor tersebut umumnya memiliki pola kerja yang lebih fleksibel dan memungkinkan perempuan untuk tetap terlibat dalam aktivitas ekonomi tanpa sepenuhnya meninggalkan peran domestik.

Dari sisi ekonomi, upah seharusnya menjadi faktor pendorong partisipasi kerja sebagaimana dijelaskan dalam teori penawaran tenaga kerja oleh Jacob Mincer (1962), yang menyatakan bahwa individu terdorong untuk bekerja ketika upah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, kenaikan upah akan meningkatkan partisipasi kerja, dan hal ini didukung oleh penelitian Novlitha dan Hasan (2023) yang menemukan bahwa upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja.

Namun, kondisi di Jawa Barat tidak sepenuhnya sejalan dengan teori tersebut. Meskipun upah minimum meningkat selama periode 2018–2024, terdapat kesenjangan upah yang tinggi antarwilayah. Pada tahun 2024, upah

minimum Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang masing-masing mencapai Rp5.219.263 dan Rp5.257.834, sedangkan Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Kuningan hanya berada pada kisaran Rp2.086.126 dan Rp2.074.666. Tingginya upah di daerah industri juga tidak selalu diikuti oleh tingginya TPAK perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa upah bukan satu-satunya faktor penentu keputusan perempuan untuk bekerja. Di sisi lain, hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan temuan yang tidak konsisten, di mana Cholifah dan Sutrisno (2024) menemukan bahwa upah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja.

Selain faktor ekonomi, keterbatasan perempuan dalam angkatan kerja juga berkaitan dengan akses terhadap sumber daya yang dapat meningkatkan kemampuan individu. Berdasarkan teori *Human Capital* Becker (1964), Rata-rata lama sekolah (RLS) dan angka harapan hidup (AHH) merupakan bentuk investasi sumber daya manusia yang dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan seseorang untuk bekerja. Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan karena memiliki kompetensi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara itu, kondisi kesehatan yang baik mendukung kemampuan perempuan untuk bekerja secara produktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, peningkatan kualitas tersebut dapat memperbesar peluang perempuan untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja (Arbianti & Suchaina, 2025).

Meskipun rata-rata lama sekolah perempuan terus meningkat, peningkatan tersebut belum selalu diikuti oleh peningkatan partisipasi kerja. Sebagian besar tenaga kerja masih didominasi oleh lulusan berpendidikan rendah, sedangkan tingkat pengangguran relatif tinggi pada lulusan pendidikan menengah, khususnya SMK. Akibatnya, perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi, sehingga sebagian dari mereka memilih bekerja tidak sesuai bidang atau tidak masuk ke angkatan kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan partisipasi kerja perempuan. Selain itu, hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan temuan

yang tidak konsisten, di mana Cholifah dan Sutrisno (2024) menemukan bahwa Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPAK perempuan, sedangkan Novlitha dan Surbakti (2023) menunjukkan bahwa Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan tidak berpengaruh signifikan terhadap TPAK.

Selain pendidikan, kesehatan perempuan juga menjadi faktor penting yang memengaruhi kesiapan perempuan untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja. Di Provinsi Jawa Barat, perbaikan kualitas Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan tercermin dari meningkatnya angka harapan hidup perempuan selama periode 2018–2024 berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Namun, peningkatan AHH perempuan tidak berarti bahwa persoalan kesehatan perempuan telah sepenuhnya selesai. Perempuan tetap menghadapi risiko kesehatan spesifik sepanjang siklus hidup, mulai dari kesehatan reproduksi, menstruasi, kehamilan, persalinan, nifas, hingga risiko penyakit tertentu yang dapat memengaruhi kualitas hidup dan produktivitas. Hal ini terlihat dari masih adanya risiko mortalitas perempuan di Jawa Barat. Pada tahun 2020, jumlah kematian pasien perempuan di rumah sakit di Jawa Barat tercatat sebanyak 26.527 jiwa. Angka tersebut menunjukkan bahwa meskipun AHH perempuan mengalami peningkatan, risiko kematian perempuan tetap menjadi persoalan yang perlu diperhatikan. Temuan penelitian mengenai pengaruh kesehatan terhadap partisipasi kerja perempuan juga menunjukkan hasil yang beragam.

Selain faktor ekonomi dan kualitas sumber daya manusia, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja juga dipengaruhi oleh kondisi rumah tangga. Salah satu indikator yang mencerminkan kondisi tersebut adalah dependency ratio, yaitu perbandingan jumlah penduduk usia nonproduktif terhadap penduduk usia produktif. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (2024), dependency ratio di Provinsi Jawa Barat sebesar 43,12, yang menunjukkan masih besarnya beban tanggungan dalam rumah tangga. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan pengasuhan dan perawatan anggota keluarga sehingga dapat membatasi kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam pasar kerja.

Fenomena tersebut sejalan dengan Teori Ekonomi Rumah Tangga (New Household Economics) yang dikemukakan Becker (1965), yang menjelaskan bahwa rumah tangga mengalokasikan waktu antara aktivitas pasar (market work) dan aktivitas rumah tangga (household production). Becker (1991) selanjutnya menjelaskan bahwa keputusan bekerja merupakan bagian dari keputusan rumah tangga dalam mengalokasikan waktu dan sumber daya. Ketika jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan meningkat, kebutuhan terhadap aktivitas pengasuhan dan pekerjaan domestik juga meningkat. Kondisi tersebut menyebabkan perempuan, yang umumnya masih memegang tanggung jawab utama dalam pekerjaan domestik, cenderung mengalokasikan lebih banyak waktunya untuk aktivitas rumah tangga sehingga waktu yang tersedia untuk bekerja di pasar menjadi lebih terbatas. Berdasarkan kondisi tersebut, dependency ratio diduga menjadi salah satu determinan yang memengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis determinan TPAK perempuan di Provinsi Jawa Barat tahun 2018–2024 dengan menggunakan variabel Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan, Upah, Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan, dan dependency ratio.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Seberapa besar Upah Minimum Kabupaten / Kota terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di wilayah Provinsi Jawa Barat?
2. Seberapa besar Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di wilayah Provinsi Jawa Barat?
3. Seberapa besar Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di wilayah Provinsi Jawa Barat?
4. Seberapa besar *Dependency ratio* berpengaruh terhadap tingkat partisipasi

angkatan kerja perempuan di wilayah Provinsi Jawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk menganalisis pengaruh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk menganalisis pengaruh Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk menganalisis pengaruh *Dependency ratio* terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Provinsi Jawa Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil yang diperoleh dari pengembangan ilmu pembangunan ekonomi ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan pada bidang karya ilmiah lainnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi peningkatan partisipasi kerja perempuan melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, dan program pemberdayaan gender.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Teori Feminisme Liberal (1792)

Feminisme Liberal merupakan salah satu aliran pemikiran feminisme yang berangkat dari prinsip dasar *liberalisme*, yaitu kebebasan individu, persamaan hak, dan kesempatan yang setara bagi setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin. Dalam pandangan Feminisme Liberal, perempuan dan laki-laki pada dasarnya memiliki kemampuan rasional yang sama sehingga keduanya berhak memperoleh kesempatan yang setara dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, serta akses terhadap sumber daya ekonomi (Abhirama *et al.*, 2022).

Gagasan Feminisme Liberal mulai berkembang melalui pemikiran Mary Wollstonecraft dalam karyanya *A Vindication of the Rights of Woman* (1792). Wollstonecraft berpendapat bahwa perempuan merupakan individu yang memiliki kemampuan berpikir rasional sebagaimana laki-laki sehingga berhak memperoleh pendidikan yang sama. Menurutnya, pendidikan merupakan sarana penting untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan posisi sosial perempuan. Dengan memperoleh pendidikan yang layak, perempuan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, maupun ekonomi.

Pemikiran tersebut kemudian dikembangkan oleh John Stuart Mill dalam *The Subjection of Women* (1869) bersama gagasan Harriet Taylor Mill, yang menolak berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan publik. Menurut pandangan ini, kesempatan untuk bekerja, memperoleh penghasilan, mengembangkan karier, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan seharusnya ditentukan oleh kemampuan individu, bukan oleh jenis kelamin. Perbedaan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi tidak dipandang sebagai akibat dari perbedaan kemampuan biologis, melainkan sebagai konsekuensi dari konstruksi sosial yang membatasi akses, kesempatan, dan kebebasan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

Feminisme Liberal memandang rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan sebagai salah satu bentuk ketimpangan gender dalam akses terhadap

kegiatan ekonomi. Perempuan sering menghadapi berbagai hambatan untuk berpartisipasi dalam pasar kerja, seperti keterbatasan akses pendidikan, kesempatan memperoleh pekerjaan dengan upah yang layak, kondisi kesehatan, serta pembagian peran domestik yang belum setara. Hambatan tersebut dapat memengaruhi keputusan perempuan untuk memasuki maupun bertahan dalam angkatan kerja. Oleh karena itu, Feminisme Liberal menjadi grand theory yang menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, namun kesempatan tersebut belum sepenuhnya terwujud karena masih adanya hambatan sosial dan pembagian peran gender yang tidak setara.

2.1.2 Teori Penawaran Tenaga Kerja

Teori penawaran tenaga kerja menjelaskan keputusan individu untuk masuk angkatan kerja dan menentukan jumlah waktu kerja yang ditawarkan pada tingkat upah tertentu. Keputusan tersebut dipengaruhi oleh tingkat upah, kebutuhan ekonomi, pendidikan, keterampilan, kondisi demografis, jumlah tanggungan keluarga, pendapatan non-kerja, serta preferensi antara bekerja dan menikmati waktu luang (Sholeh, 2007 dalam Ashary *et al*, 2024).

Dalam teori klasik Adam Smith, tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang terserap ditentukan melalui interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja menunjukkan jumlah individu yang bersedia bekerja pada tingkat upah tertentu, sedangkan permintaan tenaga kerja menunjukkan kebutuhan perusahaan terhadap tenaga kerja dalam proses produksi. Keseimbangan antara keduanya akan menentukan tingkat upah dan kesempatan kerja di pasar tenaga kerja (Ananthy *et al*, 2025). Dalam penelitian ini, perhatian lebih difokuskan pada penawaran tenaga kerja, karena TPAK perempuan mencerminkan keputusan dan kesediaan perempuan untuk menawarkan tenaga kerjanya di pasar kerja. Adam Smith juga memandang tenaga kerja sebagai faktor utama dalam proses produksi karena berperan dalam menciptakan nilai barang dan jasa. Upah merupakan balas jasa atas tenaga yang diberikan sekaligus sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup (Gjorgjiev *et al*, 2024). Oleh karena itu, semakin layak upah yang ditawarkan, semakin besar dorongan individu untuk masuk ke angkatan kerja.

Pandangan Adam Smith tersebut kemudian dikembangkan secara lebih mendalam melalui teori penawaran tenaga kerja Jacob Mincer (1962). Mincer menekankan bahwa keputusan bekerja merupakan hasil pilihan rasional individu dalam mengalokasikan waktu antara pekerjaan di pasar tenaga kerja (*market work*), waktu luang (*leisure*), dan pekerjaan rumah tangga (*home production*). Individu akan menawarkan tenaga kerjanya apabila manfaat ekonomi dari bekerja lebih besar daripada manfaat yang diperoleh dari aktivitas non-kerja.

Menurut Mincer (1962), perubahan upah memengaruhi penawaran tenaga kerja melalui efek substitusi (*substitution effect*) dan efek pendapatan (*income effect*). Efek substitusi terjadi ketika kenaikan upah meningkatkan nilai ekonomi waktu kerja dan membuat biaya kesempatan waktu luang menjadi lebih tinggi. Kondisi tersebut mendorong individu untuk masuk ke angkatan kerja atau menambah jam kerja. Sebaliknya, efek pendapatan terjadi ketika kenaikan upah meningkatkan pendapatan sehingga individu dapat memenuhi kebutuhannya dengan jam kerja yang lebih sedikit dan memilih menambah waktu luang (Sholeh, 2007 dalam Ashary *et al*, 2024). Dengan demikian, hubungan upah dan penawaran tenaga kerja pada umumnya bersifat positif apabila efek substitusi lebih besar daripada efek pendapatan.

Dalam kerangka teori penawaran tenaga kerja, Mincer (1962) menjelaskan bahwa keputusan individu untuk menawarkan tenaga kerja dipengaruhi oleh pendapatan permanen keluarga (*permanent family income*) dan kemampuan memperoleh pendapatan di pasar kerja (*market earning power*). Hubungan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

Dalam kerangka teori Mincer (1962), hubungan antara penawaran tenaga kerja dan faktor ekonomi dapat dijelaskan melalui model:

$$m = \beta_p y + w + u$$

Keterangan:

m = jumlah tenaga kerja yang ditawarkan ke pasar kerja

y = pendapatan permanen keluarga (*permanent family income*)

w = tingkat upah atau kemampuan memperoleh pendapatan (*market earning power*)

u = faktor lain yang memengaruhi keputusan bekerja

Model tersebut menjelaskan bahwa pendapatan keluarga memiliki pengaruh negatif terhadap penawaran tenaga kerja, sedangkan tingkat upah memiliki pengaruh positif terhadap penawaran tenaga kerja. Peningkatan pendapatan keluarga dapat meningkatkan konsumsi waktu luang sehingga mengurangi dorongan seseorang untuk bekerja. Sebaliknya, peningkatan tingkat upah meningkatkan insentif individu untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja karena nilai ekonomi dari waktu kerja menjadi lebih tinggi (Cahyantini *et al*, 2024).

Pengembangan teori penawaran tenaga kerja Mincer selanjutnya (Mincer, 1974) juga menekankan pentingnya modal manusia (*human capital*) menjelaskan bahwa pendidikan dan pengalaman kerja dapat meningkatkan keterampilan, produktivitas, peluang kerja, dan tingkat upah. Oleh karena itu, modal manusia turut memengaruhi keputusan individu untuk masuk ke angkatan kerja. Penelitian Novlitha dan Hasan (2023) juga menunjukkan bahwa upah berpengaruh positif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Kenaikan upah meningkatkan nilai ekonomi dari bekerja sehingga mendorong individu untuk menawarkan tenaga kerjanya, sesuai dengan konsep efek substitusi Mincer (1962).

Dengan demikian, teori Adam Smith dan Mincer memiliki hubungan yang saling melengkapi. Adam Smith menjelaskan pembentukan upah dan kesempatan kerja melalui mekanisme permintaan dan penawaran pada tingkat pasar, sedangkan Mincer menjelaskan bagaimana tingkat upah, pendapatan keluarga, pendidikan, serta pembagian waktu memengaruhi keputusan bekerja pada tingkat individu.

2.1.3 Teori Human Capital (Becker 1964)

Teori *Human Capital* dikembangkan oleh Gary S. Becker (1964) yang memandang manusia sebagai aset bernilai yang dapat ditingkatkan melalui investasi pada pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan kesehatan. Menurut Becker, investasi tersebut akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga individu memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang lebih baik dalam memasuki serta berpartisipasi di angkatan kerja. Human capital tidak hanya meningkatkan produktivitas tenaga kerja, tetapi juga memperbesar peluang seseorang untuk memperoleh pekerjaan dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi

(Arbianti & Suchaina, 2025).

Menurut Becker (1964), keputusan seseorang untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja merupakan hasil pertimbangan terhadap manfaat (*returns*) yang diperoleh dari investasi pada modal manusia (*human capital*), seperti pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan kesehatan. Investasi tersebut dilakukan dengan harapan menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan berupa peningkatan produktivitas, kesempatan kerja, dan tingkat pendapatan. Oleh karena itu, individu yang memiliki tingkat pendidikan dan kualitas kesehatan yang lebih baik cenderung memiliki insentif yang lebih besar untuk memasuki pasar kerja guna memperoleh pengembalian (*return*) atas investasi yang telah dilakukan. Semakin tinggi manfaat ekonomi yang diharapkan, semakin besar pula kecenderungan individu untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja (Nermelita et al., 2025).

Suhendra dalam Kholifaturrohmah *et al* (2022) menjelaskan bahwa negara yang memiliki *human capital* unggul akan cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Di Indonesia, kualitas sumber daya manusia dapat diukur melalui *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan *Human Development Report* (2022), nilai IPM Indonesia mencapai 0,705, menempatkan Indonesia pada kategori pembangunan manusia tinggi, namun masih berada pada peringkat 116 dari 191 negara (Kholifaturrohmah *et al*, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan Perempuan dan kesehatan Perempuan masih menjadi tantangan penting dalam memperkuat daya saing sumber daya manusia, termasuk di tingkat provinsi seperti Jawa Barat.

Pendidikan merupakan bentuk investasi *human capital* yang paling utama karena meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan berpikir, dan produktivitas individu. Menurut Becker (1964), investasi pendidikan dilakukan dengan harapan memperoleh manfaat ekonomi di masa depan berupa kesempatan kerja yang lebih luas dan pendapatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perempuan yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki motivasi yang lebih besar untuk memasuki angkatan kerja agar investasi pendidikan yang telah ditempuh dapat memberikan pengembalian (*return*) dalam bentuk pekerjaan dan

pendapatan. Temuan Permata Cita *et al* (2020) juga menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan, semakin besar peluang memperoleh pekerjaan dengan upah yang layak. Pendidikan dapat diperoleh melalui jalur formal, seperti sekolah dan perguruan tinggi, maupun jalur nonformal melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan.

Selain pendidikan Perempuan, kesehatan Perempuan juga merupakan bagian penting dari teori *human capital*. Becker (1964) menjelaskan bahwa kesehatan merupakan investasi yang meningkatkan kapasitas individu untuk bekerja secara optimal sepanjang siklus kehidupannya. Perempuan dengan kondisi kesehatan yang lebih baik memiliki kemampuan fisik dan mental yang lebih tinggi untuk mencari pekerjaan, mempertahankan pekerjaan, dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ekonomi (Nermelita *et al*, 2025). Dalam penelitian ini, kondisi kesehatan diproksikan menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan. Semakin tinggi AHH perempuan menunjukkan semakin baik kualitas kesehatan penduduk perempuan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan peluang mereka untuk menjadi bagian dari angkatan kerja.

Dalam penelitian ini, teori *Human Capital* digunakan untuk menjelaskan bahwa Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan dan Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan merupakan bentuk investasi modal manusia yang meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi tenaga kerja perempuan. Pendidikan meningkatkan kemampuan, keterampilan, serta ekspektasi pendapatan sehingga mendorong perempuan untuk memasuki angkatan kerja guna memperoleh *return* atas investasi pendidikannya. Sementara itu, kesehatan yang diproksikan melalui Angka Harapan Hidup (AHH) meningkatkan kapasitas perempuan untuk bekerja secara produktif dalam jangka panjang. Dengan demikian, semakin baik kualitas *human capital* perempuan, semakin besar kecenderungan mereka untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja.

2.1.4 Teori Ekonomi Rumah Tangga (Becker 1991)

Teori Ekonomi Rumah Tangga (*New Household Economics*) merupakan pendekatan ekonomi mikro yang dikembangkan oleh Gary S. Becker untuk menjelaskan bagaimana rumah tangga mengambil keputusan ekonomi melalui

pengelolaan sumber daya yang dimiliki guna mencapai kesejahteraan maksimum. Becker (1965) melalui artikelnya *A Theory of the Allocation of Time* menjelaskan bahwa rumah tangga tidak hanya berperan sebagai konsumen barang dan jasa, tetapi juga sebagai unit produksi (*household production*) yang menghasilkan manfaat rumah tangga (*household commodities*) melalui kombinasi barang yang diperoleh dari pasar dan waktu yang dialokasikan oleh anggota keluarga. Dalam teori ini, waktu dipandang sebagai sumber daya ekonomi yang terbatas sehingga setiap individu harus menentukan bagaimana mengalokasikan waktunya pada berbagai aktivitas yang memberikan manfaat terbesar.

Menurut Becker (1965), keputusan ekonomi rumah tangga tidak hanya berkaitan dengan penggunaan pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan alokasi waktu antara aktivitas pasar (*market work*) dan aktivitas nonpasar (*household production*). Aktivitas pasar merupakan kegiatan yang menghasilkan pendapatan melalui pekerjaan berupah, sedangkan aktivitas nonpasar meliputi pekerjaan domestik, pengasuhan anak, serta perawatan anggota keluarga. Oleh karena itu, rumah tangga akan mengalokasikan waktu dan tenaga kerja anggotanya pada berbagai aktivitas yang dianggap mampu memaksimalkan kesejahteraan keluarga.

Selanjutnya, Becker (1991) melalui *A Treatise on the Family* menjelaskan bahwa keluarga merupakan unit pengambilan keputusan ekonomi yang mengalokasikan sumber daya berdasarkan kondisi dan kebutuhan rumah tangga. Keputusan setiap anggota keluarga tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik individu, tetapi juga oleh tingkat pendapatan, jumlah anggota keluarga, struktur umur, serta kebutuhan konsumsi rumah tangga. Perubahan kondisi rumah tangga akan mendorong keluarga melakukan penyesuaian terhadap penggunaan sumber daya yang dimiliki, termasuk dalam menentukan partisipasi anggota keluarga dalam angkatan kerja.

Becker (1991) menjelaskan bahwa pembagian kerja (*division of labor*) dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk efisiensi ekonomi keluarga. Mengenai pembagian kerja tersebut, Becker (1991, hlm. 30) menyatakan:

“The most pervasive division is between married women, who traditionally have devoted most of their time to childbearing and other domestic activities, and married men, who have hunted, soldiered, farmed, and engaged in other ‘market’

activities.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perempuan yang telah menikah secara tradisional mengalokasikan sebagian besar waktunya untuk kegiatan pengasuhan anak dan pekerjaan domestik, sedangkan laki-laki lebih banyak berpartisipasi dalam aktivitas pasar. Pembagian kerja tersebut menyebabkan perempuan memiliki tanggung jawab domestik yang lebih besar sehingga kesempatan untuk bekerja di pasar relatif lebih terbatas dibandingkan laki-laki. Penjelasan tersebut diperkuat oleh Becker (1991, hlm. 41) yang menyatakan:

“Specialized investments and time allocation together with biological differences in comparative advantage imply that married men specialize in the market sector and married women in the household sector.”

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa alokasi waktu dan spesialisasi dalam rumah tangga menyebabkan laki-laki lebih banyak terspesialisasi pada aktivitas pasar (*market sector*), sedangkan perempuan lebih banyak terspesialisasi pada aktivitas rumah tangga (*household sector*). Dengan demikian, keputusan perempuan untuk bekerja tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi, tetapi juga oleh pembagian waktu antara pekerjaan berupah dan tanggung jawab domestik dalam rumah tangga.

Karakteristik ketenagakerjaan perempuan menunjukkan bahwa perempuan sering kali menjalankan peran ganda, yaitu sebagai pelaku kegiatan ekonomi sekaligus sebagai penanggung jawab utama pekerjaan domestik. Selain bekerja untuk memperoleh pendapatan, perempuan juga bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, pengelolaan rumah tangga, serta perawatan anggota keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan perempuan cenderung mempertimbangkan fleksibilitas waktu kerja, lokasi pekerjaan, dan kemampuan pekerjaan tersebut untuk disesuaikan dengan tanggung jawab domestik. Oleh karena itu, perempuan relatif lebih banyak bekerja pada sektor perdagangan, jasa, usaha mikro, pekerjaan rumahan (*home-based work*), pertanian keluarga, maupun sektor informal yang menawarkan fleksibilitas waktu, meskipun umumnya memiliki pendapatan yang lebih rendah, perlindungan ketenagakerjaan yang terbatas, dan peluang pengembangan karier yang lebih kecil dibandingkan sektor formal (ILO, 2018; BPS, 2024). Selain itu, perempuan juga lebih sering mengalami jeda dalam karier

(*interrupted career*) akibat kehamilan, persalinan, maupun tanggung jawab pengasuhan anak sehingga keputusan untuk memasuki pasar kerja tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh kondisi rumah tangga.

Hubungan Teori Ekonomi Rumah Tangga Becker dengan variabel dependency ratio dapat dijelaskan melalui konsep *allocation of time* dan *division of labor*. Dependency ratio merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia nonproduktif dengan jumlah penduduk usia produktif. Semakin tinggi dependency ratio, semakin besar jumlah anggota keluarga yang memerlukan dukungan ekonomi maupun pengasuhan, seperti anak-anak dan lanjut usia. Menurut Becker (1965), waktu merupakan sumber daya yang terbatas sehingga peningkatan kebutuhan terhadap aktivitas rumah tangga akan mengurangi waktu yang tersedia untuk melakukan aktivitas pasar (market work). Dalam kondisi tersebut, perempuan yang secara tradisional memiliki tanggung jawab lebih besar terhadap pekerjaan domestik akan mengalokasikan lebih banyak waktunya untuk kegiatan pengasuhan dan perawatan anggota keluarga.

Sejalan dengan hal tersebut, Becker (1991, hlm. 41) menunjukkan bahwa pembagian kerja dalam rumah tangga menyebabkan perempuan lebih banyak terspesialisasi pada aktivitas domestik. Oleh karena itu, ketika jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan meningkat, kebutuhan terhadap pengasuhan dan perawatan juga meningkat sehingga waktu yang tersedia bagi perempuan untuk bekerja di pasar menjadi semakin terbatas.

Berdasarkan Teori Ekonomi Rumah Tangga Becker (1965; 1991), peningkatan dependency ratio berpotensi menurunkan peluang perempuan untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja karena meningkatnya alokasi waktu untuk kegiatan domestik dan pengasuhan. Dengan kata lain, semakin tinggi jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan, semakin besar beban rumah tangga yang harus dipenuhi perempuan sehingga kecenderungan perempuan untuk memasuki atau tetap berada dalam angkatan kerja menjadi lebih rendah. Penjelasan tersebut sejalan dengan penelitian Ayuningtyas dan Fitrah (2022) yang menemukan bahwa dependency ratio berpengaruh negatif terhadap partisipasi kerja perempuan karena meningkatnya beban domestik lebih dominan dibandingkan dorongan

ekonomi untuk bekerja. Temuan tersebut juga didukung oleh Kaur dan Parneet (2025) yang menunjukkan bahwa tingginya proporsi penduduk usia nonproduktif meningkatkan kebutuhan pengasuhan dalam rumah tangga sehingga dapat menghambat aktivitas produktif perempuan.

2.1.5 Konsep Triple Burden Perempuan

Konsep *triple burden* berasal dari kerangka *triple role of women* yang dikembangkan oleh Caroline Moser. Moser menjelaskan bahwa perempuan, khususnya dalam rumah tangga berpendapatan rendah, sering menjalankan tiga peran secara bersamaan, yaitu peran reproduktif, produktif, dan kemasyarakatan. Konsep ini digunakan untuk menunjukkan bahwa kontribusi perempuan tidak hanya terdapat dalam pekerjaan yang menghasilkan pendapatan, tetapi juga dalam pekerjaan domestik dan kegiatan sosial yang sering tidak dibayar serta kurang diperhitungkan dalam analisis ekonomi (Moser, 1993). Caroline Moser menjelaskan konsep *triple role*, yaitu tiga peran yang umumnya dijalankan perempuan:

1. Peran reproduktif berkaitan dengan pemeliharaan rumah tangga dan keberlangsungan anggota keluarga. Peran ini mencakup melahirkan dan mengasuh anak, memasak, membersihkan rumah, berbelanja, merawat anggota keluarga yang sakit atau lanjut usia, serta memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya. Meskipun tidak menghasilkan pendapatan secara langsung, pekerjaan reproduktif penting untuk memelihara dan menyiapkan tenaga kerja dalam keluarga. Namun, pekerjaan ini umumnya tidak dibayar, tidak tercatat sebagai kegiatan ekonomi, dan lebih banyak dibebankan kepada perempuan (March *et al*, 1999).
2. Peran produktif mencakup kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh pendapatan maupun memenuhi kebutuhan keluarga. Peran ini dapat dilakukan melalui pekerjaan formal, informal, usaha mandiri, pekerjaan pertanian, atau sebagai pekerja keluarga yang tidak dibayar. Perempuan dan laki-laki sama-sama dapat menjalankan peran produktif, tetapi pekerjaan perempuan sering kurang terlihat dan kurang dihargai

dibandingkan pekerjaan laki-laki, terutama ketika dilakukan dalam usaha keluarga atau sektor informal (March *et al*, 1999).

3. Peran kemasyarakatan berkaitan dengan keterlibatan dalam kegiatan sosial dan pengelolaan kebutuhan masyarakat. Moser membedakan peran ini menjadi *community managing role* dan *community politics role*. *Community managing role* mencakup kegiatan sukarela, seperti posyandu, kegiatan keagamaan, organisasi lingkungan, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan pengelolaan kebutuhan bersama. Kegiatan tersebut umumnya dilakukan perempuan tanpa upah pada waktu luangnya. Sementara itu, *community politics role* berkaitan dengan kepemimpinan dan pengambilan keputusan formal yang lebih sering dijalankan laki-laki serta dapat memberikan status, kekuasaan, atau imbalan ekonomi (March *et al*, 1999).

Ketiga peran tersebut tidak selalu menjadi beban. Peran tersebut berubah menjadi *triple burden* ketika perempuan harus menjalankannya secara bersamaan tanpa pembagian tugas yang seimbang dengan laki-laki dan tanpa dukungan layanan pengasuhan atau fasilitas sosial yang memadai. Perempuan yang memasuki pekerjaan berbayar sering kali tetap dianggap sebagai pihak utama yang bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga dan kegiatan sosial. Dengan demikian, bertambahnya peran produktif tidak selalu diikuti oleh berkurangnya peran reproduktif dan kemasyarakatan. Kondisi inilah yang menimbulkan beban kerja berlapis, keterbatasan waktu, konflik peran, serta kelelahan fisik dan psikologis. Istilah *women's triple burden* juga digunakan sebagai padanan dari *women's triple role* ketika ketiga tanggung jawab tersebut menciptakan beban yang tidak seimbang.

Triple burden dapat membatasi waktu dan kemampuan perempuan untuk mencari pekerjaan, mengikuti pelatihan, bekerja penuh waktu, atau mempertahankan pekerjaannya. Perempuan dapat memilih pekerjaan informal, pekerjaan paruh waktu, atau pekerjaan yang dekat dengan rumah agar dapat tetap menjalankan tanggung jawab domestik. Pada kondisi tertentu, besarnya tanggung jawab pengasuhan dan pekerjaan rumah tangga juga dapat menyebabkan

perempuan mengurangi jam kerja atau keluar dari angkatan kerja. Penelitian Miranti et al (2022) mengenai peran perempuan dalam perekonomian Indonesia menunjukkan bahwa beban pekerjaan produktif, reproduktif, dan kemasyarakatan dapat memperlebar kesenjangan gender apabila menurunkan produktivitas perempuan atau mendorong perempuan meninggalkan angkatan kerja.

2.2 Penelitian Terdahulu

Peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan telah banyak dikaji melalui berbagai pendekatan empiris. Beberapa penelitian terdahulu memberikan gambaran yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut ini:

1. Penelitian oleh Argiani dan Ayu Arini (2025) menggunakan metode regresi linear berganda (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) wanita, inflasi berpengaruh positif namun tidak signifikan, upah berpengaruh negatif tidak signifikan, sedangkan wanita yang mengurus rumah tangga berpengaruh negatif signifikan terhadap TPAK wanita.
2. Penelitian oleh Elfrida *et al* (2025) menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka dan *dependency ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap TPAK, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan (rata-rata lama sekolah) dan upah minimum provinsi tidak berpengaruh signifikan.
3. Penelitian oleh Susilawati dan Perwithosuci (2025) menggunakan data panel dengan model Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah perempuan berpengaruh negatif signifikan terhadap TPAK, sementara upah minimum provinsi dan keterlibatan perempuan di parlemen berpengaruh positif signifikan, serta kepala rumah tangga perempuan dan angka harapan hidup tidak berpengaruh signifikan.
4. Penelitian oleh Ananthy *et al* (2025) menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Perempuan berpengaruh signifikan terhadap TPAK perempuan, sedangkan upah dan usia produktif tidak berpengaruh signifikan.

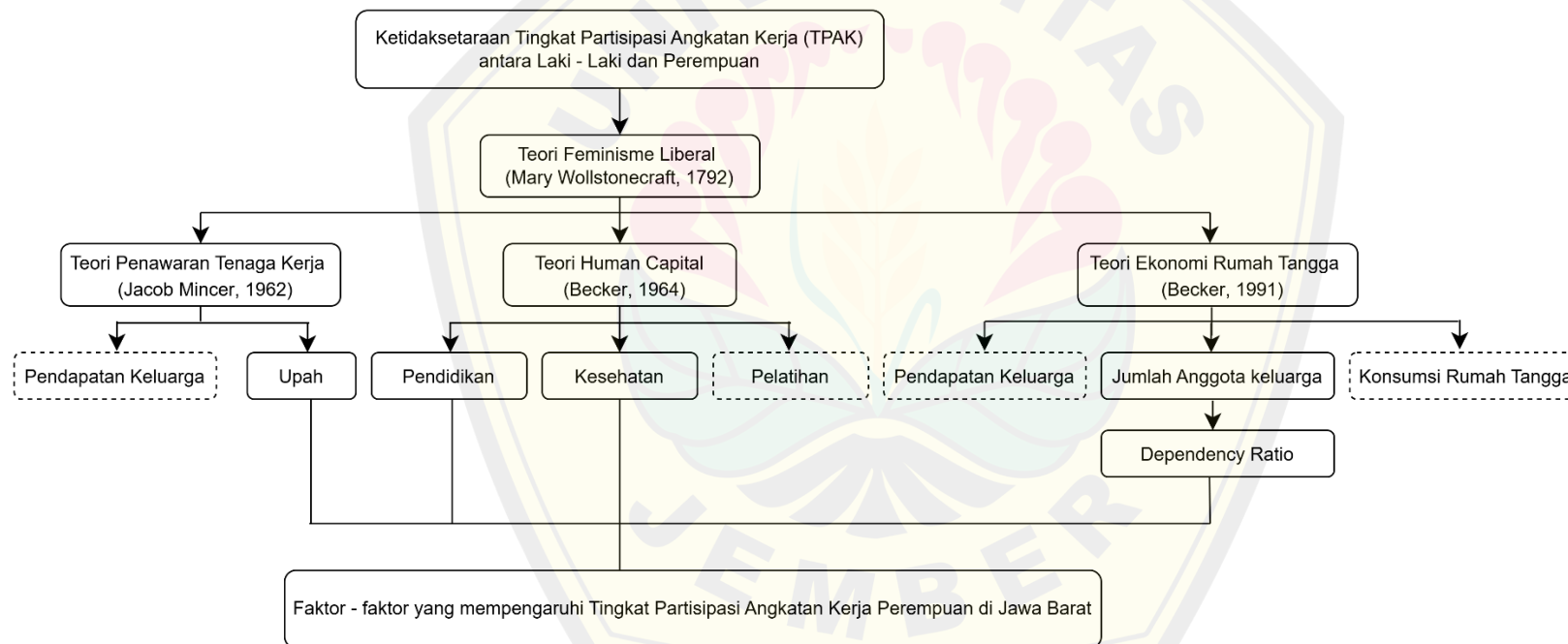
5. Penelitian oleh Pertiwi *et al* (2025) menggunakan model regresi probit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dipengaruhi oleh interaksi kompleks berbagai faktor, dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan memiliki hubungan non-linear berbentuk U, di mana partisipasi terendah terjadi pada tingkat Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan menengah terutama di pedesaan, namun meningkat pada Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan lebih tinggi dan didukung keterampilan TIK. Selain itu, Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan mental dan kognitif berpengaruh positif, sementara status perkawinan dan beban pengasuhan anak menjadi hambatan utama, meskipun dukungan antar generasi dalam rumah tangga dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja.
6. Penelitian oleh Melati Wulandari dan Suwandono (2025) menggunakan data panel dengan model Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan berpengaruh positif signifikan terhadap TPAK perempuan, upah berpengaruh negatif signifikan, pernikahan dini berpengaruh negatif signifikan, sedangkan kepala rumah tangga perempuan dan tingkat fertilitas berpengaruh positif namun tidak signifikan.
7. Penelitian oleh Cholifah dan Sutrisno (2024) menggunakan regresi data panel dengan model terbaik Fixed Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan berpengaruh positif signifikan terhadap TPAK perempuan, pengeluaran per kapita berpengaruh positif tidak signifikan, upah berpengaruh negatif tidak signifikan, dan PDRB berpengaruh negatif signifikan.
8. Penelitian oleh Hasti dan Destiningsih (2022) menggunakan data panel dengan model Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan dan *dependency ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap TPAK, sedangkan upah minimum kabupaten / kota berpengaruh negatif namun tidak signifikan.

9. Penelitian oleh Ayuningtyas dan Sari Islami (2022) menggunakan metode time-series dengan ARDL Error Correction Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek fertilitas berpengaruh negatif signifikan, *dependency ratio* dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap TPAK, namun dalam jangka panjang seluruh variabel tidak berpengaruh signifikan.
10. Penelitian oleh Maulana *et al* (2022) menggunakan data panel dengan model Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan berpengaruh positif signifikan terhadap TPAK, sedangkan upah minimum dan angka harapan hidup berpengaruh negatif signifikan.

Dari berbagai penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan menunjukkan hasil yang bervariasi, baik dari sisi arah maupun signifikansinya.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan uraian tentang hubungan antar variabel yang terkait dalam masalah terutama yang akan diteliti, sesuai dengan rumusan masalah dan tinjauan pustaka. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bentuk diagram berikut ini:



Gambar 2.1. Kerangka konseptual

2.3.1 Hipotesis

Dalam penelitian ini akan dirumuskan hipotesis guna memberikan arah dan pedoman dalam melakukan penelitian. Berdasarkan kerangka konseptual diatas, maka disusunlah hipotesisdari penelitian ini adalah:

1. H₁: Upah Minimum Kabupaten (UMK) berpengaruh positif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Jawa Barat.
2. H₂: Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan berpengaruh positif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Jawa Barat.
3. H₃: Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan berpengaruh positif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Jawa Barat.
4. H₄: *Dependency ratio* berpengaruh negatif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Jawa Barat.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori (explanatory research). Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen, yaitu Upah Minimum Kabupaten (UMK), rata-rata lama sekolah perempuan, angka harapan hidup perempuan, dan *dependency ratio* terhadap variabel dependen, yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Jawa Barat.

3.1.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 27 kabupaten/kota. Sampel penelitian berjumlah 25 kabupaten/kota yang dihitung dengan menggunakan rumus Slovin. Penelitian menggunakan data panel periode 2018–2024. Periode tersebut dipilih karena menggambarkan kondisi sosial ekonomi terkini, termasuk masa pandemi COVID-19 dan masa pemulihan ekonomi. Data penelitian diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), seperti SAKERNAS dan SUSENAS. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota yang memiliki fluktuasi pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan selama periode penelitian.

3.1.3 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah 25 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2018–2024. Analisis dilakukan untuk melihat pengaruh upah, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan, Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan, dan *dependency ratio* terhadap TPAK perempuan.

3.1.4 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Jawa Barat periode 2018–2024. Penelitian difokuskan pada pengaruh upah, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan, Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan, dan *dependency ratio* terhadap partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi.

3.1.5 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2018-2024. Data pendukung juga diperoleh dari Portal Data Jawa Barat serta berbagai literatur akademik yang relevan dengan isu kesetaraan gender dan ketenagakerjaan perempuan.

3.2 Metode Analisis

3.2.1 Analisis Data Panel

Analisis regresi panel merupakan kombinasi antara data cross section dan time series yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Menurut Maulana *et al* (2022) model data panel dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut:

$$\hat{Y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X1_{it} + \hat{\beta}_2 X2_{it} + \hat{\beta}_3 X3_{it} + \hat{\beta}_4 X4_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} = Variabel dependen pada unit ke- i dan waktu ke- t

X_{it} = Variabel independen pada unit ke- i dan waktu ke- t

α = Konstanta (intersep)

β = Koefisien regresi

ε_{it} = Komponen error

Model yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini mengadaptasi model yang digunakan oleh Maulana *et al* (2022), yaitu sebagai berikut ini:

$$TPAK_{it} = \beta_0 + \beta_1 RLS_{it} + \beta_2 UMR_{it} + \beta_3 AHH_{it} + \varepsilon_{it}$$

Kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk model ekonometrika menjadi berikut ini:

$$\widehat{TPAKP}_{it} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 UMK_{it} + \hat{\beta}_2 RLSP_{it} + \hat{\beta}_3 AHHP_{it} + \hat{\beta}_4 DR_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

$TPAKP_{it}$ = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan wilayah ke- i pada tahun ke- t (persen)

UMR_i = Upah Minimum Kabupaten / Kota (Rupiah)

$RLSP_{it}$ = Rata-rata Lama Sekolah perempuan (tahun)

$AHHP_{it}$ = Angka Harapan Hidup perempuan (tahun)

DR_{it} = Dependency ratio (%)

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi masing-masing variabel independen

ε_{it} = Error term

3.3 Metode Estimasi Regresi Data Panel

3.3.1 Common Effect Model (CEM)

CEM adalah model regresi paling sederhana yang menggabungkan data tanpa membedakan waktu dan individu, dengan asumsi $\mu_i = 0$ atau sama dengan ν_{it} (Norhikmah *et al*, 2022). Persamaan umum untuk CEM sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{it} + \dots + \beta_k X_{kit} + \varepsilon_{it}$$

3.3.2 Fixed Effect Model (FEM)

FEM adalah model regresi panel yang mengasumsikan perbedaan intersep antarindividu, namun konstan antarwaktu dengan koefisien regresi yang tetap. (Norhikmah *et al*, 2022). Persamaan umum untuk FEM sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_i D_{i1} X_{it} + \beta_1 X_{it} + \dots + \beta_k X_{kit} + \varepsilon_{it}$$

3.3.3 Random Effect Model (REM)

REM memperhitungkan perbedaan individu melalui error term yang berkorelasi antarindividu dan waktu., Persamaan umum untuk REM menurut Norhikmah *et al* (2022) sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_0 + \beta_1 X_{it} + \dots + \beta_k X_{kit} + w_{it}$$

3.4 Uji Pemilihan Model

3.4.1 Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan model mana yang lebih sesuai antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM). Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan intersep antar individu (kabupaten/kota) dalam model (Nursan & Anwar, 2025). Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_0 : Model Common Effect lebih tepat digunakan. H_1 : Model Fixed Effect lebih tepat digunakan.

Apabila nilai probabilitas F-statistic $< \alpha$ (0,05), maka H_0 ditolak dan model Fixed Effect dinilai lebih sesuai dibandingkan dengan Common Effect

3.4.2 Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model terbaik antara FEM dan REM dengan melihat korelasi efek individu terhadap variabel independen. Jika p-value $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan FEM menjadi model yang lebih tepat (Nursan & Anwar, 2025). Hipotesis yang digunakan adalah:

H_0 : Model Random Effect lebih tepat (tidak ada korelasi antara efek individu dan variabel independen).

H_1 : Model Fixed Effect lebih tepat (ada korelasi antara efek individu dan variabel independen).

3.4.3 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji Lagrange Multiplier atau Breusch Pagan LM digunakan untuk menentukan model terbaik antara Common Effect (CEM) dan Random Effect (REM). Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah adanya efek acak signifikan pada model (Nursan & Anwar, 2025). Hipotesis yang digunakan adalah:

H_0 : Model Common Effect lebih tepat (tidak ada efek acak).

H_1 : Model Random Effect lebih tepat (terdapat efek acak signifikan).

Apabila nilai probabilitas $< \alpha$ (0,05), maka H_0 ditolak dan model Random Effect lebih tepat digunakan.

3.5 Uji Asumsi Klasik

3.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam regresi variabel dependen (Y) maupun independen (X) atau keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Dalam konsep ini menggunakan pendekatan Jarque-Berra $< X^2$ tabel residualnya berdistribusi tidak normal dan jika probabilitasnya Jarque-Berra $> \alpha = 5\%$ maka residualnya normal (Napitulu *et al*, 2022: 141).

3.5.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mendeteksi hubungan antarvariabel

independen. Jika korelasi antarvariabel $> 0,80$, maka terjadi multikolinieritas dan interpretasi koefisien menjadi tidak valid (Napitulu *et al*, 2022: 141).

3.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser digunakan untuk melihat apakah varian residual konstan. Jika probabilitas t-hitung $> 0,05$, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika pelanggaran ditemukan, maka digunakan robust standard error untuk menghasilkan estimasi yang konsisten ((Napitulu *et al*, 2022: 143).

3.5.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antarresidual dalam model. Pengujian dilakukan menggunakan Durbin-Watson Test ((Napitulu *et al*, 2022): 142), dengan kriteria:

$DW < dL \rightarrow$ terdapat autokorelasi positif

$dU < DW < 4 - dU \rightarrow$ tidak terdapat autokorelasi

$DW > 4 - dL \rightarrow$ terdapat autokorelasi negatif

Apabila terjadi autokorelasi, maka perbaikan dapat dilakukan melalui metode Generalized Least Squares (GLS) atau penggunaan robust standard error (clustered) untuk memastikan hasil estimasi tetap valid.

3.6 Uji Statistika

3.6.1 Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap TPAK perempuan. Hipotesis yang digunakan adalah:

H_0 : Variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap TPAK perempuan.

H_1 : Variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap TPAK perempuan. Apabila nilai probabilitas F-statistic $< 0,05$ maka H_0 ditolak, yang berarti semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap TPAK perempuan (Nursan dan Anwar, 2025).

3.6.2 Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap TPAK perempuan secara individual. Hipotesis yang digunakan adalah:

H₁: Secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independent terhadap variabel dependen.

Keputusan diambil berdasarkan nilai probabilitas t-statistic. Jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka H₀ ditolak dan variabel independen tersebut berpengaruh signifikan secara parsial terhadap TPAK perempuan (Nursan dan Anwar, 2025).

3.6.3 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji ini mengukur seberapa besar variabel independen menjelaskan variasi TPAK perempuan. Semakin tinggi nilai R² (mendekati 1), semakin baik kemampuan model menjelaskan variabel dependen (Nursan dan Anwar, 2025).

3.7 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional menjelaskan makna variabel agar dapat diukur secara kuantitatif. Definisi dari variabel penelitian ini, yaitu:

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (Y)

TPAK perempuan adalah persentase penduduk perempuan usia ≥ 15 tahun yang bekerja atau mencari kerja dari total perempuan usia kerja. Variabel ini mencerminkan tingkat keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi dan diukur dalam satuan persen (%). Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

2. Upah (X₁) - Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK)

Upah diukur berdasarkan besaran Upah Minimum Kabupaten / Kota yang ditetapkan pemerintah provinsi/kabupaten di Jawa Barat setiap tahun. UMK merupakan standar upah terendah yang wajib dibayarkan perusahaan kepada pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Variabel ini menggambarkan tingkat insentif ekonomi yang diterima pekerja, yang dapat memengaruhi keputusan perempuan untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja. Satuan pengukuran adalah rupiah per bulan, dan data bersumber dari BPS dan Portal Pemerintahan Jawa Barat.

3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan (X_2)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk perempuan, yaitu jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas dalam menempuh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan formal. Variabel ini menggambarkan tingkat akses dan pencapaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan perempuan di suatu wilayah. Satuan pengukuran adalah tahun, dan data bersumber dari BPS.

4. Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan (X_3)

Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan diukur melalui angka harapan hidup penduduk perempuan, yakni rata-rata usia yang diperkirakan sejak lahir dengan asumsi pola mortalitas yang berlaku saat ini. Variabel ini mencerminkan kualitas Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan dan kesejahteraan perempuan. Satuan pengukuran adalah tahun, dengan data bersumber dari BPS.

5. *Dependency ratio* (X_4)

Angka *dependency ratio* melihat bagaimana beban penduduk yang berada dalam usia produktif (yaitu umur 15-64 tahun) terhadap penduduk berada para usia belum produktif (yaitu umur 0-14 tahun) dan penduduk berada para usia sudah tidak lagi produktif (diatas umur 65 tahun). Variabel angka *dependency ratio* ini dinyatakan dalam satuan persentase (%). Data diperoleh dari BPS.

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Kondisi Ekonomi di Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Jawa Barat terdiri dari 27 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, dari sekitar 48,68 juta jiwa pada tahun 2018 menjadi 50,34 juta jiwa pada tahun 2024. Letaknya yang dekat dengan pusat ekonomi nasional menjadikan Jawa Barat sebagai kawasan utama industri dan perdagangan. Konsumsi rumah tangga juga menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Badan Pusat Statistika, 2025).

Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mencapai 5,64 persen dengan kontribusi sebesar 13,09 persen terhadap perekonomian nasional. Perekonomian didominasi oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Selain itu, tingkat kemiskinan menurun menjadi 7,25 persen dan tingkat pengangguran sebesar 8,17 persen. Namun, pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 4,11 persen akibat tekanan ekonomi global. Kondisi semakin memburuk pada tahun 2020 ketika pandemi COVID-19 menyebabkan ekonomi Jawa Barat mengalami kontraksi sebesar -2,44 persen. Pembatasan aktivitas masyarakat menyebabkan penurunan konsumsi, perdagangan, industri, ekspor, dan impor. Pandemi juga meningkatkan jumlah pengangguran dan pekerja informal.

Selain itu, pandemi menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan tingkat inflasi menjadi rendah. Pemerintah kemudian melakukan berbagai kebijakan seperti bantuan sosial, stimulus fiskal, dan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi. Hasilnya, pada tahun 2021 ekonomi Jawa Barat mulai pulih dengan pertumbuhan sebesar 6,21 persen. Pemulihan ini didukung oleh meningkatnya mobilitas masyarakat, program vaksinasi, serta membaiknya konsumsi dan investasi. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,61 persen yang menunjukkan proses pemulihan masih berlanjut.

Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat kembali meningkat menjadi 5,15 persen. Pertumbuhan ini didukung oleh konsumsi rumah tangga,

belanja pemerintah, investasi, serta sektor industri dan pertanian. Selanjutnya pada tahun 2024, ekonomi Jawa Barat tumbuh sebesar 5,02 persen. Walaupun sedikit melambat dibanding tahun sebelumnya, kondisi ini menunjukkan bahwa ekonomi daerah tetap stabil. Pertumbuhan didukung oleh meningkatnya mobilitas masyarakat serta perkembangan sektor industri, transportasi, dan jasa keuangan (Badan Pusat Statistika, 2025).

Pada triwulan I tahun 2024, kondisi ekonomi Jawa Barat menunjukkan perkembangan positif. Permintaan industri pengolahan meningkat baik dari pasar domestik maupun ekspor. Penyaluran kredit perbankan juga meningkat sehingga mendukung aktivitas ekonomi. Selain itu, meningkatnya mobilitas masyarakat mendorong pertumbuhan sektor transportasi dan konsumsi masyarakat (Badan Pusat Statistika, 2025). Selanjutnya pada triwulan IV tahun 2024, pertumbuhan ekonomi semakin kuat karena meningkatnya aktivitas pariwisata, konsumsi rumah tangga, dan investasi. Jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara meningkat sehingga berdampak pada kenaikan tingkat hunian hotel dan konsumsi jasa rekreasi. Dari sisi pemerintah, realisasi anggaran dan investasi juga mengalami peningkatan yang menunjukkan tingginya kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi Jawa Barat. Dengan demikian, perekonomian Jawa Barat menunjukkan ketahanan yang cukup baik dan mampu mempertahankan pertumbuhan hingga akhir tahun 2024.

4.1.2 Gambaran Umum Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2018–2024 menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis. Jumlah penduduk usia kerja terus meningkat dari 36,30 juta orang pada tahun 2018 menjadi 38,67 juta orang pada tahun 2024. Sebagian besar penduduk usia kerja berada di wilayah perkotaan, sedangkan jumlah penduduk usia kerja di perdesaan cenderung menurun akibat urbanisasi dan perpindahan penduduk ke kota untuk mencari pekerjaan.

Jumlah angkatan kerja di Jawa Barat juga mengalami peningkatan dari 22,81 juta orang pada tahun 2018 menjadi 26,19 juta orang pada tahun 2024. Namun, angkatan kerja laki-laki masih mendominasi dibandingkan perempuan. Di sisi lain, perempuan lebih banyak berada dalam kategori bukan angkatan kerja

karena masih banyak yang berperan dalam pekerjaan domestik rumah tangga (Badan Pusat Statistika, 2018).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Jawa Barat cenderung meningkat meskipun sempat mengalami penurunan pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020. Pada tahun 2018 TPAK tercatat sebesar 62,92 persen dan meningkat menjadi 67,71 persen pada tahun 2024. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pada tahun 2018, TPAK laki-laki mencapai 83,09 persen, sedangkan perempuan hanya 42,37 persen. Namun, dalam beberapa tahun terakhir TPAK perempuan mengalami peningkatan yang cukup besar hingga mencapai 50,59 persen pada tahun 2024 (Badan Pusat Statistika, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam dunia kerja mulai mengalami peningkatan, meskipun kesenjangan gender masih terlihat cukup besar.

Jumlah penduduk bekerja di Jawa Barat juga mengalami perubahan selama periode penelitian. Pada tahun 2020 jumlah penduduk bekerja menurun akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak pekerja mengalami PHK dan pengurangan jam kerja. Setelah pandemi mereda, kondisi ketenagakerjaan mulai membaik dan jumlah penduduk bekerja meningkat kembali hingga mencapai 24,42 juta orang pada tahun 2024. Peningkatan ini didukung oleh pemulihan ekonomi, perkembangan industri, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan sektor pariwisata, dan meningkatnya pelaku UMKM.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Barat masih tergolong tinggi dibandingkan beberapa provinsi lain di Indonesia. Pada tahun 2020, jumlah pengangguran meningkat tajam akibat dampak pandemi Covid-19. Namun, kondisi tersebut mulai membaik secara bertahap hingga TPT turun menjadi 6,75 persen pada tahun 2024. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2018 TPT perempuan sebesar 8,70 persen, lebih tinggi dibandingkan TPT laki-laki sebesar 7,90 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam memperoleh pekerjaan.

Namun, kondisi tersebut mengalami perubahan pada tahun 2024. TPT laki-laki justru lebih tinggi dibandingkan perempuan, yaitu sebesar 7,12 persen,

sedangkan TPT perempuan sebesar 6,13 persen. Penurunan TPT perempuan menunjukkan bahwa kesempatan kerja dan partisipasi perempuan mulai meningkat, terutama didukung oleh berkembangnya sektor jasa, UMKM, dan ekonomi digital yang memberikan peluang kerja lebih fleksibel bagi perempuan.

Selain itu, TPT di wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Tingginya pengangguran di perkotaan disebabkan oleh persaingan kerja yang lebih besar dan tingginya arus urbanisasi. Berdasarkan tingkat Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan, lulusan SMK memiliki tingkat pengangguran tertinggi, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.

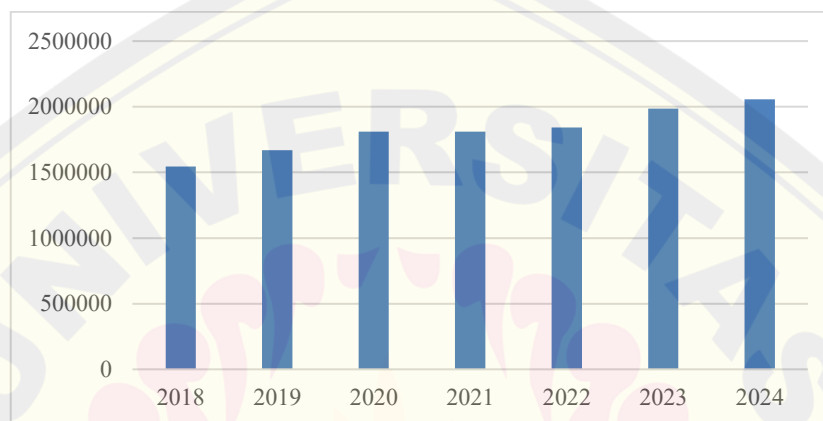
Untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan, pemerintah telah menjalankan berbagai program seperti Dana Desa, One Village One Product (OVOP), Desa Digital, One Village One Company (OVOC), dan program Petani Milenial (Badan Pusat Statistika, 2018c). Program-program tersebut bertujuan meningkatkan kesempatan kerja, mengembangkan ekonomi desa, serta mendorong partisipasi masyarakat, termasuk perempuan, dalam kegiatan ekonomi. Secara keseluruhan, kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat selama 2018–2024 menunjukkan adanya proses pemulihan dan peningkatan partisipasi kerja, meskipun masih terdapat kesenjangan gender dan masalah pengangguran yang perlu diperhatikan.

4.2 Gambaran Umum Upah Minimum Kabupaten / Kota, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan, Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan dan *Dependency ratio* di Jawa Barat

4.2.1 Gambaran Umum Upah Minimum Kabupaten / Kota Jawa Barat

Upah minimum merupakan instrumen strategis dalam kebijakan ketenagakerjaan yang berfungsi untuk melindungi tenaga kerja sekaligus menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup layak. Di Indonesia, upah minimum diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun

2023 tentang Pengupahan. Penetapan upah minimum dilakukan melalui Keputusan Gubernur, termasuk di Provinsi Jawa Barat yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebagai batas minimum pembayaran upah oleh pemberi kerja. Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah dengan aktivitas ekonomi dan industri yang tinggi di Indonesia, perkembangan upah minimum di daerah ini menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik ekonomi maupun ketenagakerjaan.



Gambar 4.1. Grafik Upah Minimum Provinsi Jawa Barat 2018-2024

Sumber: BPS, data diolah 2026

UMP Jawa Barat selama tahun 2018–2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, UMP Jawa Barat sebesar Rp1.544.361 dan meningkat menjadi Rp2.057.495 pada tahun 2024. Namun, pada tahun 2021 UMP tidak mengalami kenaikan akibat dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan ekonomi. Setelah pandemi mereda, UMP kembali meningkat secara bertahap hingga tahun 2024. Kenaikan upah minimum ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menyesuaikan dengan inflasi serta pertumbuhan ekonomi.

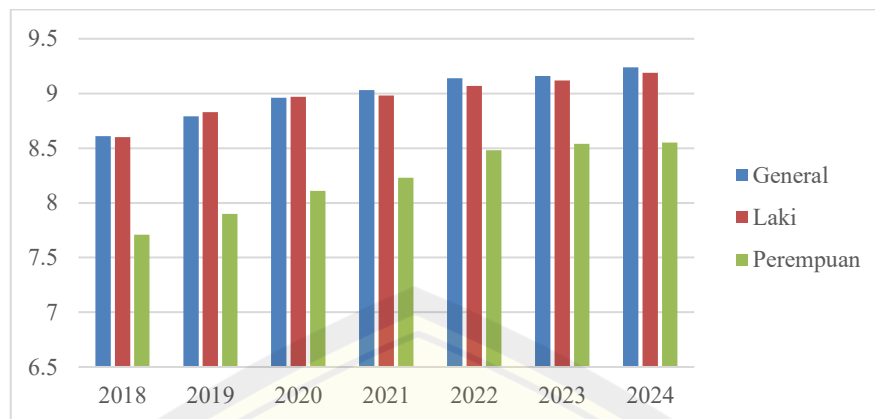
Pada tingkat kabupaten/kota, terdapat perbedaan besaran upah minimum yang cukup besar. Daerah industri seperti Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi memiliki UMK tertinggi di Jawa Barat. Pada tahun 2024, UMK Kota Bekasi mencapai Rp5,34 juta, Kabupaten Karawang Rp5,25 juta, dan Kabupaten Bekasi Rp5,21 juta. Tingginya upah di wilayah tersebut dipengaruhi oleh banyaknya industri, investasi, dan tingginya produktivitas tenaga kerja.

Sebaliknya, daerah yang lebih banyak bergantung pada sektor pertanian dan informal memiliki tingkat upah minimum yang lebih rendah. Pada tahun 2024, UMK Kabupaten Pangandaran sebesar Rp2,08 juta, Kabupaten Ciamis Rp2,08 juta, Kabupaten Kuningan Rp2,07 juta, dan Kota Banjar Rp2,07 juta. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Jawa Barat.

Pada masa pandemi tahun 2021, sebagian besar daerah mengalami stagnasi upah minimum karena kondisi ekonomi yang melemah. Namun, setelah kondisi ekonomi membaik, hampir seluruh kabupaten/kota kembali mengalami kenaikan upah minimum hingga tahun 2024. Secara umum, perkembangan UMP dan UMK di Jawa Barat menunjukkan tren yang meningkat, meskipun perbedaan tingkat upah antar wilayah masih menjadi tantangan dalam kebijakan pengupahan di masa depan.

4.2.2 Gambaran Umum Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan di Jawa Barat

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kualitas sumber daya manusia yang berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Kondisi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan di Jawa Barat selama periode 2018–2024 menunjukkan tren yang terus mengalami peningkatan. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas meningkat dari 8,61 tahun pada tahun 2018 menjadi 9,24 tahun pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan akses dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan formal. Namun demikian, jika dilihat lebih dalam, capaian tersebut masih menunjukkan bahwa secara rata-rata penduduk Jawa Barat baru menyelesaikan pendidikan hingga jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Artinya, sebagian besar penduduk belum mencapai jenjang pendidikan menengah atas (SMA) yang menjadi target dalam program wajib belajar 12 tahun.



Gambar 4.2. Grafik Rata – Rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Barat 2018-2024

Sumber: BPS, data diolah 2026

Berdasarkan jenis kelamin, rata-rata lama sekolah perempuan juga mengalami peningkatan dari 7,71 tahun pada tahun 2018 menjadi 8,55 tahun pada tahun 2024. Sementara itu, rata-rata lama sekolah laki-laki meningkat dari 8,60 tahun menjadi 9,19 tahun pada periode yang sama. Meskipun kedua kelompok mengalami peningkatan, terdapat kesenjangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan antara laki-laki dan perempuan, di mana tingkat Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan perempuan masih relatif lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam mengakses Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan, baik yang disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, maupun budaya.

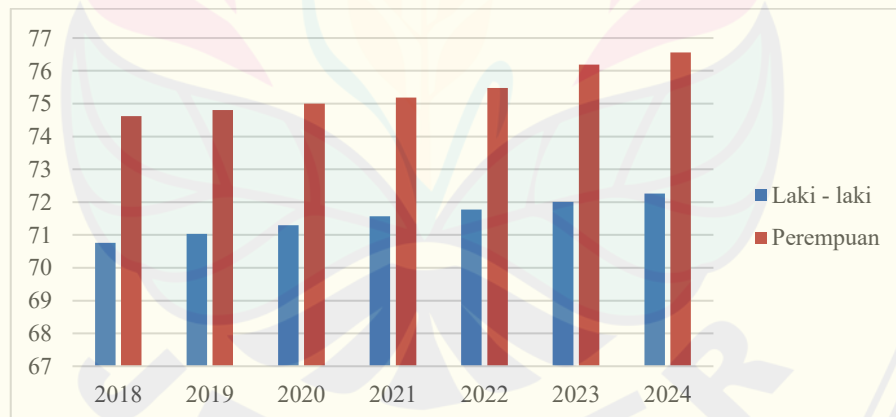
Kondisi pendidikan sejalan dengan struktur kualitas tenaga kerja di Jawa Barat yang masih relatif rendah. Tingkat pendidikan tenaga kerja dapat menjadi salah satu ukuran kualitas tenaga kerja. Kenyataannya, tenaga kerja di Jawa Barat masih didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan rendah. Pada tahun 2018, tenaga kerja dengan lulusan Sekolah Dasar (SD) ke bawah masih mencapai 38,89 persen. Distribusi terbesar kedua adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 30,61 persen, sedangkan tenaga kerja dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan diploma dan universitas hanya sebesar 12,64 persen (Badan Pusat Statistika, 2018).

Kondisi tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan hingga tahun 2024. Sebagian besar tenaga kerja di Jawa Barat masih berasal dari kelompok

dengan tingkat Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan rendah, yaitu lulusan SD ke bawah sebesar 37,25 persen, diikuti oleh lulusan SMP sebesar 17,66 persen. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh tenaga kerja di Jawa Barat belum memenuhi target program wajib belajar 12 tahun. Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja ini berdampak pada rendahnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja di Jawa Barat. Tenaga kerja dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki keterampilan yang terbatas dan lebih banyak bekerja di sektor informal dengan produktivitas yang relatif rendah.

4.2.3 Gambaran Umum Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan di Jawa Barat

Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan merupakan salah satu indikator utama dalam pembangunan manusia yang mencerminkan kualitas hidup dan produktivitas penduduk. Angka harapan hidup (AHH) menunjukkan rata-rata perkiraan lama hidup penduduk sejak lahir. Angka harapan hidup tidak hanya mencerminkan kondisi Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan tingkat kesejahteraan, akses terhadap layanan Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan, serta kualitas lingkungan hidup.



Gambar 4.3. Grafik Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Barat 2018-2024
Sumber: BPS, data diolah 2026

Kondisi Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan di Jawa Barat selama periode 2018–2024 menunjukkan tren yang terus mengalami peningkatan. Angka harapan hidup laki-laki meningkat dari 70,76 tahun pada tahun 2018 menjadi 72,26 tahun pada tahun 2024, sedangkan perempuan meningkat dari 74,62 tahun menjadi

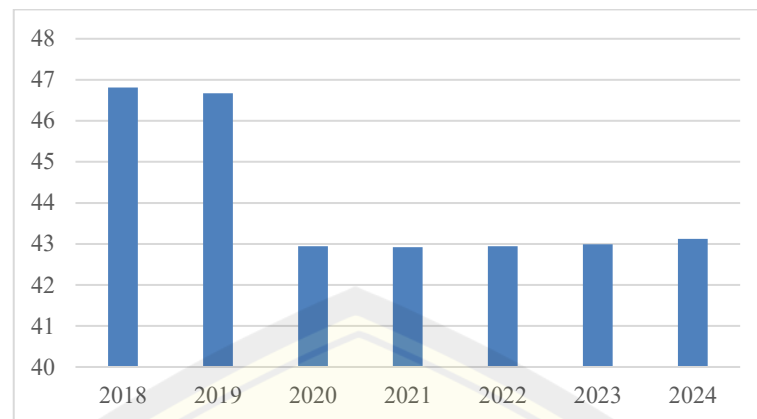
76,56 tahun. Kenaikan angka harapan hidup tersebut mengindikasikan adanya peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, termasuk ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga medis, serta program-program pemerintah di bidang kesehatan. Selain itu, perbaikan kondisi ekonomi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola hidup sehat juga turut berkontribusi dalam meningkatkan usia harapan hidup penduduk.

Berdasarkan jenis kelamin, angka harapan hidup perempuan secara konsisten lebih tinggi dibandingkan laki-laki selama periode pengamatan. Selisih antara keduanya relatif stabil, yaitu sekitar 4 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peluang hidup yang lebih panjang dibandingkan laki-laki, yang merupakan fenomena umum yang juga terjadi di berbagai wilayah lainnya. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Dari sisi perilaku, laki-laki cenderung memiliki risiko lebih tinggi terhadap perilaku tidak sehat seperti merokok, konsumsi alkohol, serta aktivitas dengan risiko kecelakaan yang lebih tinggi, baik di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun angka harapan hidup terus meningkat, hal ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh penduduk menikmati kualitas kesehatan yang sama. Masih terdapat potensi ketimpangan dalam akses layanan kesehatan, terutama antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta antar kelompok sosial ekonomi. Kondisi ini dapat mempengaruhi kualitas Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan masyarakat secara keseluruhan dan menjadi tantangan dalam pemerataan pembangunan Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan di Jawa Barat.

4.2.4 Gambaran Umum *Dependency ratio* di Jawa Barat

Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang paling penting dalam perencanaan pembangunan. Indikator ini menggambarkan seberapa besar beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif (15–64 tahun) terhadap kelompok usia non-produktif, yakni anak-anak (0–14 tahun) dan lansia (65 tahun ke atas). Semakin rendah angkanya, semakin ringan beban tanggungan yang diemban, dan semakin besar potensi akumulasi tabungan serta pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.



Gambar 4.4. Grafik *Dependency ratio* Provinsi Jawa Barat 2018-2024

Sumber: BPS, data diolah 2026

Pada awal periode, *dependency ratio* Jawa Barat tercatat sebesar 46,81 (2018), yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung hampir 47 orang non-produktif. Angka ini sedikit turun menjadi 46,67 pada 2019, lalu mengalami penurunan yang jauh lebih tajam pada 2020, yakni menjadi 42,94. Penurunan sebesar hampir empat poin dalam satu tahun ini mengindikasikan pergeseran struktural yang cukup besar dalam komposisi penduduk proporsi usia produktif meningkat signifikan dibandingkan kelompok non-produktif. Tren ini berlanjut hingga 2021 saat rasio menyentuh titik terendahnya di angka 42,92, meski penurunannya sudah jauh lebih kecil.

Penurunan tajam ini merupakan buah dari keberhasilan program Keluarga Berencana yang dijalankan pada dekade-dekade sebelumnya, yang secara bertahap menekan angka kelahiran dan memperbesar proporsi penduduk usia kerja. Fenomena ini adalah ciri khas dari proses transisi demografi menuju kondisi yang dikenal sebagai bonus demografi.

Memasuki 2022 hingga 2024, pola tren berubah. *Dependency ratio* tercatat 42,94 pada 2022, naik ke 42,99 pada 2023, dan kembali meningkat menjadi 43,12 pada 2024. Kenaikan ini arahnya konsisten ke atas sebuah sinyal awal bahwa fase penurunan sudah berakhir. Tekanan kenaikan ini kemungkinan besar didorong oleh mulai membanjirnya generasi kelahiran era 1950-an dan 1960-an ke dalam kelompok usia 65 tahun ke atas, sehingga beban tanggungan usia tua perlahan meningkat meski beban tanggungan anak-anak terus berkurang.

Meskipun terjadi kenaikan, angka 43,12 pada 2024 tetap berada jauh di bawah posisi awal tahun 2018. Jawa Barat masih menikmati kondisi demografis yang menguntungkan, dan jendela bonus demografi ini diperkirakan masih terbuka selama beberapa tahun ke depan sebelum mulai menyempit menjelang 2035–2040. Tantangan terbesar adalah memastikan bahwa keunggulan ini tidak berlalu begitu saja. Investasi dalam kualitas sumber daya manusia usia produktif melalui Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan vokasi, perluasan lapangan kerja berkualitas, dan penguatan jaminan Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan merupakan agenda mendesak.

4.3 Hasil Analisis Penelitian

4.3.1 Uji Pemilihan Model Terbaik

1. Uji Chow

Tabel 4.1. Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	19.480205	(24,146)	0.0000

Sumber: Lampiran 3

Berdasarkan hasil Uji Chow pada Tabel 4.1, diperoleh nilai probabilitas Cross-section F sebesar 0,0000. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0,05), sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, model yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM) dibandingkan Common Effect Model (CEM). Karena model yang dipilih Fixed Effect Model (FEM) maka perlu dilakukan uji spesifikasi model berikutnya yaitu uji Hausman.

2. Uji Hausman

Tabel 4.2. Hasil Uji Hausman

Effect Test	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	46.077108	4	0.0000

Sumber: Lampiran 4

Berdasarkan tabel diatas hasil uji Husman, nilai statistik Chi-Square yang dihasilkan melalui Eviews 12 sebesar 46.077108 dengan probabilitas 0.0000 ($\leq 5\%$). Sehingga, Hipotesis Alternatif (H_1) tidak dapat ditolak, maka model yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah model estimasi Fixed Effect

Model (FEM). Karena model yang terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM) dalam uji chow dan uji hausman maka tidak perlu dilakukan uji spesifikasi model yang berikutnya yaitu uji Lagrange Multiplier (LM).

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas

Jarque-Bera	4.632306
Probability	0.098652

Sumber: Lampiran 5

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode Jarque-Bera, diperoleh nilai statistik Jarque-Bera sebesar 4.632306 dengan nilai probabilitas (p-value) sebesar 0.098652. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual dalam model penelitian ini berdistribusi normal (Napitulu *et al*, 2021: 141).

2. Uji Multikolineritas

Tabel 4.4. Hasil Uji Multikolineritas

	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan	Upah	Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan	Dependency ratio
UMK	1.000000	0.454784	0.535800	-0.561422
RLS	0.454784	1.000000	0.748139	-0.511129
AHH	0.535800	0.748139	1.000000	-0.596326
DR	-0.561422	-0.51113	-0.596326	1.000000

Sumber: Lampiran 6

Berdasarkan hasil uji multikolineritas melalui matriks korelasi antar variabel independen, terlihat bahwa nilai korelasi tertinggi terdapat pada hubungan antara Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan dan Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan sebesar 0,748139. Namun, nilai tersebut masih berada di bawah batas umum yang digunakan untuk mendeteksi multikolineritas tinggi, yaitu 0,80. Sementara itu, korelasi antar variabel lainnya juga berada pada tingkat sedang hingga rendah, baik yang bernilai positif maupun negatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolineritas yang serius dalam model penelitian ini, sehingga variabel independen dapat digunakan secara

bersama-sama dalam analisis regresi tanpa menimbulkan distorsi yang signifikan terhadap hasil estimasi.

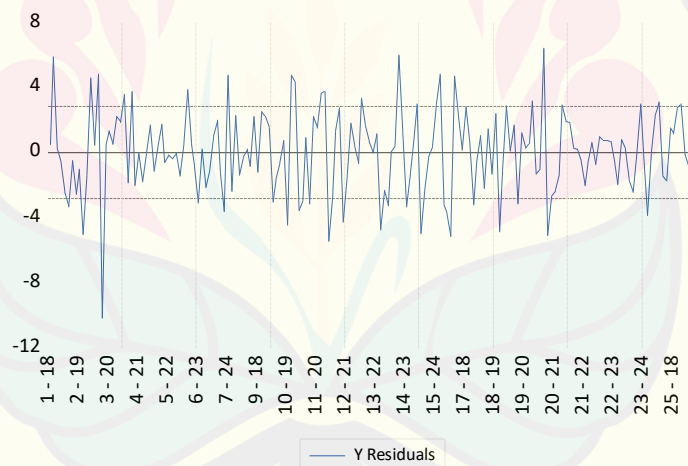
3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	55.67737	33.44122	1.664932	0.0981
UMK	-5.980045	2.955868	-2.023110	0.0449
RLS	0.358059	0.737826	0.485289	0.6282
AHH	0.453108	0.358119	1.265243	0.2078
DR	-0.032962	0.073174	-0.450463	0.6530

Sumber: Lampiran 7

Berdasarkan hasil pengujian, variabel UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0449 ($< 0,05$) sehingga mengindikasikan adanya heteroskedastisitas, sedangkan variabel RLS Perempuan, AHH Perempuan, dan DR masing-masing memiliki nilai probabilitas $> 0,05$ yang menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas secara parsial.



Gambar 4.5. Hasil Uji Heteroskedastisitas Grafik Residual

Sumber: Lampiran 8

Selain menggunakan uji Glejser, deteksi heteroskedastisitas juga dapat dilakukan melalui analisis grafik residual. Berdasarkan grafik yang ditampilkan, terlihat bahwa nilai residual masih berada dalam batas atas dan bawah yang relatif konstan, yaitu tidak melewati kisaran +500 dan -500. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran residual tidak mengalami penyimpangan yang ekstrem dan cenderung stabil di sekitar nilai tengah. Dengan demikian, secara visual grafik residual dapat

menjadi indikasi bahwa model tidak mengalami heteroskedastisitas, karena varians residual terlihat relatif konstan. Pendekatan ini sejalan dengan Napitulu *et al* (2021:143) yang menyatakan bahwa salah satu cara mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan melihat pola penyebaran residual, apabila tidak menunjukkan pola tertentu dan berada dalam batas yang wajar, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

1. Uji Autokorelasi

Tabel 4.6. Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.816905	Mean dependent var	48.25086
Adjusted R-squared	0.781791	S.D. dependent var	6.040997
S.E. of regression	2.821921	Akaike info criterion	5.062962
Sum squared resid	1162.633	Schwarz criterion	5.587412
Log likelihood	-414.0092	Hannan-Quinn criter	5.275694
F-statistic	23.26432	Durbin-Watson stat	1.864304
Prob (F-statistic)	0.000000		

Sumber: Lampiran 9

Berdasarkan hasil uji autokorelasi, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,864304. Nilai tersebut mendekati angka 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah autokorelasi.

4.3.3 Hasil Uji Hipotesis Statistik

Tabel 4.7. Hasil Uji Hipotesis

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-274.2965	61.28239	-4.475944	0.0000
UMK	14.83692	5.416747	2.739082	0.0069
RLS	-4.144016	1.352096	-3.064882	0.0026
AHH	2.057666	0.656268	3.135407	0.0021
DR	-0.373994	0.134094	-2.789053	0.0060
Effect Specification				
Cross-section Fixed (dummy variables)				
R-squared	0.816905	Mean dependent var	48.25086	
Adjusted R-squared	0.781791	S.D. dependent var	6.040997	
S.E. of regression	2.821921	Akaike info criterion	5.062962	
Sum squared resid	1162.633	Schwarz criterion	5.587412	
Log likelihood	-414.0092	Hannan-Quinn criter	5.275694	
F-statistic	23.26432	Durbin-Watson stat	1.864304	
Prob (F-statistic)	0.000000			

Sumber: Lampiran 10

1. Hasil Uji F

Berdasarkan hasil estimasi model cross-section fixed effect, diperoleh nilai F-statistic sebesar 23,26432 dengan nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,000000. Kriteria pengambilan keputusan adalah jika nilai probabilitas $F < 0,05$, maka variabel Upah Minimum Kabupaten (UMK), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan, Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan, *Dependency Ratio* (DR) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan.

2. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4.8. Hasil Uji Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-274.2965	61.28239	-4.475944	0.0000
UMK	14.83692	5.416747	2.739082	0.0069
RLS	-4.144016	1.352096	-3.064882	0.0026
AHH	2.057666	0.656268	3.135407	0.0021
DR	-0.373994	0.134094	-2.789053	0.0060

Sumber: Lampiran 10

Berdasarkan hasil regresi data panel menggunakan Fixed Effect Model (FEM) dengan efek individu (cross-section effect), diperoleh persamaan regresi berikut:

$$TPAK_{it} = -274.29 + 14.83UMK_{it} - 4.144RLS_{it} + 2.05AHH_{it} - 0.37DR_{it}$$

Berdasarkan pengujian parsial (uji t), jika nilai t-hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai t-tabel serta nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, yaitu:

- Pengaruh Upah (X1) terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (Y) di Jawa Barat

Berdasarkan hasil uji parsial, variabel Upah (X1) memiliki nilai t-hitung sebesar $2,739082 > t\text{-tabel } (1.973771337)$ dan nilai signifikansi sebesar $0,0069 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel UMK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Jawa

Barat tahun 2018 - 2024. Artinya, setiap peningkatan UMK sebesar satu satuan akan meningkatkan TPAK perempuan sebesar 14,83692 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap.

- b. Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah Perempuan (X2) terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (Y) di Jawa Barat

Berdasarkan hasil uji parsial, variabel Rata-rata Lama Sekolah Perempuan (X2) memiliki nilai t-hitung sebesar $-3,064882 > t\text{-tabel}$ (1.973771337) dan nilai signifikansi sebesar $0,0026 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Rata-rata Lama Sekolah Perempuan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Jawa Barat tahun 2018 - 2024. Artinya, setiap peningkatan RLS sebesar satu tahun akan menurunkan TPAK perempuan sebesar 4,144016 persen, dengan asumsi variabel lain tetap.

- c. Pengaruh Angka Harapan Hidup Perempuan (X3) terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (Y) di Jawa Barat

Berdasarkan hasil uji parsial, variabel Angka Harapan Hidup Perempuan (X3) memiliki nilai t-hitung sebesar $3,135407 > t\text{-tabel}$ (1.973771337) dan nilai signifikansi sebesar $0,0021 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Angka Harapan Hidup Perempuan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Jawa Barat tahun 2018 - 2024. Artinya, setiap peningkatan AHH sebesar satu tahun akan meningkatkan TPAK perempuan sebesar 2,057666 persen, dengan asumsi variabel lain tetap.

- d. Pengaruh *Dependency ratio* (X4) terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (Y) di Jawa Barat

Berdasarkan hasil uji parsial, variabel *Dependency ratio* (X4) memiliki nilai t-hitung sebesar $-2,789053 > t\text{-tabel}$ (1.973771337) dan nilai signifikansi sebesar $0,0060 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *Dependency ratio* memiliki pengaruh

negatif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Jawa Barat tahun 2018 - 2024. Artinya, setiap peningkatan dependency ratio sebesar satu persen akan menurunkan TPAK perempuan sebesar 0,373994 persen, dengan asumsi variabel lain tetap.

3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai *adjusted R square* (R^2) sebesar 0,816905. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa 81,69% variabel independent yang terdiri dari Upah Minimum Kabupaten (UMK), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan, Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan, *Dependency Ratio* (DR) berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Jawa Barat tahun 2018 - 2024. Sedangkan 18,31% sisanya menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

4.4 Pembahasan Hasil Analisis Perspektif Empiris dan Teoritis

4.4.1 Pengaruh Upah terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Jawa Barat

Hasil estimasi regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) menunjukkan bahwa variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memiliki nilai koefisien sebesar 14,83692 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0069, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa UMK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa UMK berpengaruh positif terhadap TPAK perempuan diterima. Nilai koefisien sebesar 14,83692 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan UMK sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*), akan meningkatkan TPAK perempuan sebesar 14,83692 persen.

Secara empiris, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum mampu mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam pasar kerja. Kenaikan UMK memberikan insentif ekonomi yang lebih besar sehingga bekerja menjadi pilihan yang lebih menarik dibandingkan tidak bekerja atau hanya

melakukan aktivitas domestik. Kondisi ini sesuai dengan karakteristik Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu pusat industri nasional yang didominasi oleh sektor manufaktur, perdagangan, dan jasa (BPS, 2025). Peningkatan UMK di berbagai kabupaten/kota industri, seperti Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kota Bekasi, menciptakan daya tarik bagi perempuan untuk memasuki pasar kerja karena adanya harapan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Selain itu, meningkatnya biaya hidup di kawasan perkotaan dan industri juga mendorong rumah tangga untuk menambah sumber pendapatan melalui partisipasi kerja perempuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upah masih menjadi salah satu faktor ekonomi yang penting dalam menentukan keputusan perempuan dalam berpartisipasi di angkatan kerja.

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui Teori Feminisme Liberal yang dikemukakan oleh Mary Wollstonecraft (1792) dan kemudian dikembangkan oleh John Stuart Mill serta Harriet Taylor Mill. Feminisme Liberal berpandangan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kemampuan rasional yang sama sehingga keduanya berhak memperoleh kesempatan yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, memperoleh penghasilan, dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan tidak dipandang sebagai akibat dari perbedaan biologis, melainkan karena masih adanya hambatan sosial, budaya, maupun ekonomi yang membatasi akses perempuan terhadap dunia kerja. Peningkatan UMK memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi perempuan sehingga mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung pandangan Feminisme Liberal bahwa ketika perempuan memperoleh kesempatan ekonomi yang lebih baik melalui peningkatan pendapatan dari pekerjaan, maka partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi juga akan meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap terciptanya kesempatan yang lebih setara bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi.

Selanjutnya, hasil penelitian ini juga sejalan dengan Teori Penawaran Tenaga Kerja yang dikemukakan oleh Jacob Mincer (1962). Menurut Mincer,

keputusan seseorang untuk menawarkan tenaga kerja merupakan hasil pilihan rasional antara bekerja di pasar tenaga kerja (*market work*) dengan menggunakan waktu untuk aktivitas lain, seperti waktu luang (*leisure*) atau pekerjaan rumah tangga (*home production*). Perubahan tingkat upah memengaruhi keputusan tersebut melalui dua mekanisme, yaitu *substitution effect* dan *income effect*. Pada *substitution effect*, kenaikan upah meningkatkan nilai ekonomi dari waktu bekerja sehingga biaya kesempatan (*opportunity cost*) untuk tidak bekerja menjadi lebih tinggi. Akibatnya, individu akan terdorong untuk menawarkan tenaga kerjanya karena manfaat ekonomi yang diperoleh dari bekerja menjadi lebih besar. Sebaliknya, *income effect* menjelaskan bahwa peningkatan upah dapat meningkatkan pendapatan sehingga individu memiliki kecenderungan untuk mengurangi penawaran tenaga kerjanya karena kebutuhan ekonominya telah terpenuhi. Hal ini juga sejalan dengan teori klasik Adam Smith (1776) yang menyatakan peningkatan upah akan meningkatkan manfaat ekonomi dari bekerja sehingga mendorong lebih banyak individu untuk bersedia menawarkan tenaganya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, pengaruh positif UMK terhadap TPAK perempuan menunjukkan bahwa *substitution effect* lebih dominan dibandingkan *income effect*. Artinya, kenaikan UMK di Provinsi Jawa Barat lebih banyak mendorong perempuan untuk masuk dan menjadi bagian dari angkatan kerja daripada mengurangi partisipasi kerjanya. Peningkatan upah minimum memberikan insentif ekonomi yang lebih besar sehingga perempuan memilih menawarkan tenaga kerjanya untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Temuan ini memperkuat teori Mincer (1962) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat upah yang diterima, semakin besar kecenderungan individu untuk menawarkan tenaga kerjanya. Peningkatan penawaran tenaga kerja tersebut tercermin dari meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Jawa Barat.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Susilawati dan Perwithosuci (2025) yang menyatakan bahwa upah minimum kabupaten/kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPAK perempuan di Indonesia pada periode 2020–2024. Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin

tinggi tingkat upah yang diterima, maka semakin besar dorongan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pasar kerja. Upah yang lebih tinggi tidak hanya meningkatkan daya tarik pekerjaan, tetapi juga memberikan jaminan ekonomi yang lebih baik sehingga perempuan lebih termotivasi untuk bekerja, baik sebagai pencari nafkah utama maupun sebagai penopang pendapatan rumah tangga.

Selain itu, peningkatan upah juga dapat memperluas peluang perempuan untuk bekerja di sektor formal yang umumnya menawarkan tingkat upah lebih tinggi dibandingkan sektor informal. Hal ini sejalan dengan kondisi di Jawa Barat, di mana wilayah dengan tingkat upah tinggi cenderung memiliki tingkat partisipasi kerja perempuan yang lebih besar. Dengan demikian, upah dapat berperan sebagai faktor penarik (pull factor) yang meningkatkan keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kebijakan pengupahan di Provinsi Jawa Barat perlu terus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mendorong peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan. Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) hendaknya dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, produktivitas tenaga kerja, serta kondisi ekonomi masing-masing daerah sehingga mampu memberikan insentif bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja.

4.4.2 Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Jawa Barat

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel, variabel Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan memiliki koefisien sebesar -4,144016 dengan nilai probabilitas 0,0026 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di 25 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2018–2024. Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa RLS perempuan berpengaruh positif terhadap TPAK perempuan ditolak.

Nilai koefisien negatif tersebut mengindikasikan bahwa setiap peningkatan Rata-rata Lama Sekolah sebesar 1 tahun justru cenderung menurunkan TPAK perempuan sebesar sekitar 4,14 persen, dengan asumsi variabel lain tetap. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan tingkat Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan perempuan belum diikuti oleh peningkatan keterlibatan mereka dalam pasar kerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan perempuan tidak selalu berbanding lurus dengan meningkatnya keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja. Selama periode penelitian, RLS perempuan di Jawa Barat memang terus mengalami peningkatan, namun struktur tenaga kerja masih didominasi oleh lulusan berpendidikan rendah dan sebagian besar bekerja pada sektor informal. Di sisi lain, tingkat pengangguran relatif lebih tinggi pada lulusan pendidikan menengah, khususnya lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian (*skill mismatch*) antara kompetensi yang dimiliki dengan kebutuhan pasar kerja. Akibatnya, sebagian perempuan yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi menghadapi kesulitan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki sehingga memilih menunda masuk ke dalam angkatan kerja, melanjutkan pendidikan, atau menunggu pekerjaan yang menawarkan prospek karier dan tingkat pendapatan yang lebih baik.

Selain itu, fenomena ini juga berkaitan dengan konsep *underemployment*, di mana perempuan berpendidikan tinggi enggan bekerja pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan tingkat pendidikan atau ekspektasi upah mereka. Hal ini sejalan dengan penelitian Damayanti (2021) serta Pertiwi *et al* (2025) yang menyatakan bahwa perempuan berpendidikan menengah ke atas cenderung lebih selektif dalam memilih pekerjaan, sehingga berpotensi menurunkan tingkat partisipasi kerja.

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui Teori Feminisme Liberal yang dikemukakan oleh Mary Wollstonecraft (1792). Feminisme Liberal berpandangan bahwa perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan berbagai sumber daya ekonomi. Pendidikan dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan posisi sosial perempuan sehingga diharapkan mampu

memperluas peluang perempuan dalam dunia kerja. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan perempuan belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat berbagai hambatan struktural, seperti terbatasnya kesempatan kerja yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan, ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja, serta faktor sosial yang memengaruhi keputusan perempuan untuk bekerja. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak bertentangan dengan pandangan Feminisme Liberal, melainkan menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan saja belum cukup untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan apabila belum diikuti dengan terciptanya kesempatan kerja yang setara dan inklusif.

Hasil penelitian ini menunjukkan temuan yang tidak sejalan dengan Teori Human Capital yang dikemukakan oleh Gary S. Becker (1964). Teori Human Capital menjelaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi sumber daya manusia yang mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, produktivitas, dan kemampuan individu dalam memperoleh pekerjaan serta pendapatan yang lebih baik. Dalam perspektif teori ini, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar pula peluang individu tersebut untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja karena memiliki kualitas modal manusia yang lebih baik. Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan hubungan negatif antara Rata-rata Lama Sekolah perempuan dengan TPAK perempuan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan pendidikan perempuan di Provinsi Jawa Barat belum mampu diterjemahkan menjadi peningkatan partisipasi dalam angkatan kerja. Kondisi tersebut diduga disebabkan oleh masih adanya *skill mismatch* antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, terbatasnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja perempuan berpendidikan tinggi, serta kecenderungan perempuan berpendidikan lebih tinggi untuk lebih selektif dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi, jenjang karier, maupun tingkat upah yang diharapkan. Dengan demikian, investasi pendidikan belum memberikan dampak optimal terhadap peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan karena

belum didukung oleh kondisi pasar kerja yang mampu menyerap tenaga kerja perempuan sesuai dengan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Cholifah dan Sutrisno (2024) yang menyatakan bahwa Rata-rata Lama Sekolah perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan. Namun demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Enny Novlitha dan Surbakti (2023) yang menunjukkan bahwa Rata-rata Lama Sekolah perempuan tidak berpengaruh signifikan terhadap TPAK perempuan. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh pendidikan terhadap partisipasi angkatan kerja perempuan sangat dipengaruhi oleh karakteristik pasar kerja, struktur ekonomi daerah, serta kemampuan pasar kerja dalam menyerap tenaga kerja perempuan sesuai dengan tingkat pendidikan yang dimiliki.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu memperkuat keterkaitan (*link and match*) antara dunia pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja melalui pengembangan pendidikan vokasi, peningkatan program pelatihan berbasis kompetensi, serta kerja sama yang lebih erat antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri. Selain itu, pemerintah juga perlu memperluas kesempatan kerja formal yang mampu menyerap tenaga kerja perempuan berpendidikan, memperkuat layanan informasi pasar kerja dan bimbingan karier, serta mendorong penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan ramah gender. Dengan demikian, peningkatan Rata-rata Lama Sekolah perempuan tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga dapat diikuti oleh peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Jawa Barat.

4.4.3 Pengaruh Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Jawa Barat

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel, variabel Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan memiliki koefisien sebesar 2,057666 dengan nilai probabilitas 0,0021 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di 25 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat

selama periode 2018–2024. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan berpengaruh positif terhadap TPAK perempuan terbukti.

Nilai koefisien positif tersebut mengindikasikan bahwa setiap peningkatan Angka Harapan Hidup perempuan sebesar 1 tahun akan meningkatkan TPAK perempuan sebesar sekitar 2,06 persen, dengan asumsi variabel lain tetap. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan, maka semakin besar pula partisipasi perempuan dalam angkatan kerja.

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui peran Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan sebagai faktor yang memengaruhi kemampuan individu dalam bekerja. Perempuan dengan kondisi Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan yang baik cenderung memiliki kapasitas fisik dan mental yang lebih optimal, sehingga mampu berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi secara lebih aktif. Sebaliknya, kondisi Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan yang buruk dapat menjadi hambatan dalam bekerja karena menurunkan produktivitas serta meningkatkan risiko ketidakhadiran dalam pekerjaan. Dalam penelitian ini, pengaruh positif AHH perempuan terhadap TPAK perempuan menunjukkan bahwa peningkatan kualitas kesehatan perempuan mampu meningkatkan kualitas modal manusia sehingga mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, peningkatan angka harapan hidup juga mencerminkan adanya perbaikan dalam akses dan kualitas layanan kesehatan Perempuan, termasuk fasilitas klinik bersalin, tenaga medis, serta program pemerintah di bidang kesehatan Perempuan. Hal ini sejalan dengan kondisi di Jawa Barat yang menunjukkan tren peningkatan angka harapan hidup perempuan dari tahun 2018 hingga 2024. Perbaikan tersebut berkontribusi dalam menciptakan sumber daya manusia yang lebih sehat dan produktif, sehingga mendorong peningkatan partisipasi kerja perempuan.

Meskipun demikian, sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang penelitian, peningkatan AHH perempuan tidak berarti bahwa permasalahan

kesehatan perempuan telah sepenuhnya teratasi. Perempuan masih menghadapi berbagai risiko kesehatan sepanjang siklus kehidupannya, seperti kesehatan reproduksi, kehamilan, persalinan, masa nifas, maupun penyakit tidak menular yang dapat memengaruhi produktivitas kerja. Selain itu, masih tingginya angka kematian pasien perempuan di rumah sakit di Jawa Barat menunjukkan bahwa tantangan dalam peningkatan kualitas kesehatan perempuan masih perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, peningkatan AHH perlu diiringi dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang berkelanjutan agar perempuan dapat mempertahankan kondisi kesehatannya dan terus berpartisipasi secara produktif dalam angkatan kerja.

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui Teori Feminisme Liberal yang dikemukakan oleh Mary Wollstonecraft (1792) dan dikembangkan oleh John Stuart Mill. Feminisme Liberal berpandangan bahwa perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan berbagai sumber daya ekonomi. Dalam perspektif teori ini, kesehatan merupakan salah satu hak dasar yang harus dipenuhi agar perempuan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan bukan disebabkan oleh rendahnya kemampuan perempuan, melainkan karena masih terdapat berbagai hambatan yang membatasi akses mereka terhadap kesempatan ekonomi, termasuk keterbatasan dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Oleh karena itu, meningkatnya Angka Harapan Hidup perempuan mencerminkan semakin baiknya kualitas kesehatan perempuan yang pada akhirnya memberikan kesempatan yang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung pandangan Feminisme Liberal bahwa pemenuhan hak perempuan di bidang kesehatan merupakan salah satu prasyarat penting dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja.

Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijelaskan melalui peran Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan sebagai bagian dari kualitas sumber daya manusia. Dalam Teori Human Capital yang dikemukakan oleh Gary S. Becker (1964), Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan merupakan salah satu bentuk

investasi yang mampu meningkatkan produktivitas individu. Perempuan dengan kondisi Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan yang baik memiliki kemampuan fisik dan mental yang lebih optimal, sehingga lebih mampu untuk bekerja secara efektif dan berkelanjutan. Sebaliknya, kondisi Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan yang kurang baik dapat menurunkan produktivitas serta membatasi kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Menurut Firmansyah dan Purnomo (2024), Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan yang lebih baik, harapan hidup yang lebih panjang, serta kebutuhan akan masa depan keuangan yang lebih stabil dapat mendorong perempuan untuk mencari pekerjaan atau mencapai kemandirian ekonomi. Perempuan dengan harapan hidup yang lebih tinggi juga cenderung lebih percaya diri dalam mengambil keputusan terkait karier atau usaha, karena memiliki waktu yang lebih panjang untuk mencapai tujuan ekonomi mereka. Temuan tersebut konsisten dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa peningkatan Angka Harapan Hidup perempuan tidak hanya meningkatkan kualitas kesehatan, tetapi juga memperbesar peluang perempuan untuk menjadi bagian dari angkatan kerja di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu terus memperkuat kebijakan pembangunan kesehatan perempuan sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan perempuan, penguatan layanan kesehatan reproduksi, penurunan angka kematian ibu, pencegahan penyakit tidak menular, peningkatan status gizi perempuan, serta pemerataan fasilitas kesehatan hingga wilayah kabupaten/kota. Selain itu, kebijakan kesehatan perlu diintegrasikan dengan kebijakan ketenagakerjaan melalui penyediaan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan ramah perempuan agar perempuan mampu mempertahankan produktivitasnya selama usia kerja. Dengan demikian, peningkatan Angka Harapan Hidup perempuan tidak hanya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga memperkuat kualitas modal manusia (*human capital*) sehingga mampu meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Jawa Barat.

4.4.4 Pengaruh *Dependency Ratio* terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Jawa Barat

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel, variabel *dependency ratio* memiliki koefisien sebesar -0,373994 dengan nilai probabilitas 0,0060 ($< 0,05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa *dependency ratio* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan pada 25 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2018–2024. Artinya, setiap kenaikan *dependency ratio* sebesar satu poin akan menurunkan TPAK perempuan sebesar sekitar 0,37 persen, dengan asumsi variabel lain konstan. Dengan demikian, semakin tinggi jumlah penduduk usia nonproduktif yang menjadi tanggungan, semakin rendah partisipasi perempuan dalam angkatan kerja.

Secara empiris, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meningkatnya *dependency ratio* berkaitan dengan meningkatnya beban rumah tangga yang harus dipenuhi oleh anggota keluarga usia produktif. Bertambahnya jumlah anak maupun lanjut usia dalam rumah tangga menyebabkan kebutuhan terhadap pengasuhan, perawatan, dan pekerjaan domestik juga meningkat. Dalam banyak rumah tangga, tanggung jawab tersebut masih lebih banyak dijalankan oleh perempuan sehingga perempuan cenderung mengalokasikan lebih banyak waktu untuk aktivitas domestik dibandingkan aktivitas ekonomi. Akibatnya, kesempatan perempuan untuk bekerja atau mencari pekerjaan menjadi lebih terbatas sehingga Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan mengalami penurunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Ekonomi Rumah Tangga (*New Household Economics*) yang dikemukakan oleh Gary S. Becker (1965). Becker menjelaskan bahwa waktu merupakan sumber daya yang terbatas (*allocation of time*) sehingga rumah tangga harus mengalokasikan waktu anggotanya antara aktivitas pasar (*market work*) yang menghasilkan pendapatan dan aktivitas rumah tangga (*household production*) seperti pengasuhan anak, pekerjaan domestik, serta perawatan anggota keluarga. Selanjutnya, Becker (1991) menjelaskan bahwa keluarga merupakan unit pengambilan keputusan ekonomi yang mengalokasikan sumber daya berdasarkan kondisi dan kebutuhan rumah tangga. Dalam rumah tangga terdapat pembagian kerja (*division of labor*) yang menyebabkan perempuan

secara tradisional lebih banyak mengalokasikan waktunya pada aktivitas rumah tangga dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, ketika *dependency ratio* meningkat, kebutuhan terhadap pengasuhan dan perawatan anggota keluarga juga meningkat sehingga perempuan cenderung mengurangi waktu yang tersedia untuk bekerja di pasar. Kondisi tersebut menjelaskan mengapa peningkatan *dependency ratio* diikuti oleh penurunan TPAK perempuan di Provinsi Jawa Barat.

Dalam praktiknya, perempuan masih lebih sering diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan domestik, seperti mengasuh anak, mengurus rumah tangga, dan merawat anggota keluarga. Ketika *dependency ratio* meningkat, kebutuhan terhadap pengasuhan dan perawatan anggota keluarga juga semakin besar sehingga beban domestik yang ditanggung perempuan meningkat. Kondisi tersebut membatasi waktu dan kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja. Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan Feminisme Liberal yang menegaskan bahwa rendahnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja tidak semata-mata disebabkan oleh kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh pembagian peran gender yang belum setara dalam rumah tangga dan masyarakat.

Dominannya alokasi waktu perempuan pada aktivitas rumah tangga juga dapat dijelaskan melalui konsep triple role dan triple burden dalam Kerangka Moser. Moser menjelaskan bahwa perempuan sering menjalankan tiga peran sekaligus, yaitu peran reproduktif, peran produktif, dan peran pengelolaan komunitas (Moser, 1993 dalam March et al., 1999). Peran reproduktif meliputi pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak, serta perawatan anggota keluarga, sedangkan peran produktif berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang menghasilkan pendapatan. Ketika jumlah anggota keluarga usia nonproduktif meningkat, kebutuhan terhadap pengasuhan dan perawatan juga semakin besar sehingga beban reproduktif perempuan bertambah. Kondisi tersebut membentuk triple burden yang menyebabkan waktu perempuan untuk menjalankan aktivitas produktif menjadi semakin terbatas, sehingga partisipasi perempuan dalam angkatan kerja cenderung menurun.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Hasti dan Destiningsih (2022) maupun Elfrida *et al* (2025) yang menemukan bahwa dependency ratio berpengaruh positif terhadap TPAK perempuan karena meningkatnya tekanan ekonomi mendorong perempuan untuk bekerja. Sebaliknya, hasil penelitian ini sejalan dengan Ayuningtyas dan Fitrah (2022) yang menunjukkan bahwa dependency ratio berpengaruh negatif terhadap partisipasi kerja perempuan karena meningkatnya beban domestik lebih dominan dibandingkan dorongan ekonomi untuk bekerja. Temuan ini juga didukung oleh Kaur dan Parneet (2025) yang menjelaskan bahwa tingginya proporsi penduduk usia nonproduktif meningkatkan kebutuhan pengasuhan dalam rumah tangga sehingga mengurangi aktivitas produktif perempuan. Dengan demikian, pada konteks Provinsi Jawa Barat selama periode 2018–2024, peningkatan dependency ratio lebih mencerminkan bertambahnya beban pengasuhan dan pekerjaan domestik daripada dorongan ekonomi bagi perempuan untuk memasuki pasar kerja.

Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu memperkuat kebijakan yang mendukung keseimbangan antara kehidupan keluarga dan pekerjaan (*work-life balance*) bagi perempuan. Kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui penyediaan layanan penitipan anak yang terjangkau, penguatan layanan perawatan lanjut usia, perluasan kesempatan kerja yang fleksibel dan ramah perempuan, serta mendorong pembagian peran domestik yang lebih setara di dalam rumah tangga.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Upah Minimum Kabupaten (UMK), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan perempuan, Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan perempuan, dan *dependency ratio* terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Jawa Barat tahun 2018–2024, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upah Minimum Kabupaten (UMK) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum mampu mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja, karena adanya harapan memperoleh pendapatan yang lebih layak sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.
2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa investasi pendidikan belum sepenuhnya diikuti oleh tersedianya kesempatan kerja yang sesuai dengan kompetensi perempuan, sehingga sebagian perempuan berpendidikan lebih tinggi cenderung menunda memasuki angkatan kerja atau lebih selektif dalam memilih pekerjaan.
3. Angka Harapan Hidup (AHH) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan AHH dapat meningkatkan TPAK perempuan karena kondisi Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan yang lebih baik mendukung kemampuan, kesiapan, dan keberlanjutan perempuan untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja.
4. *Dependency ratio* berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan *dependency ratio* dapat menurunkan TPAK perempuan karena semakin besar beban tanggungan, semakin besar pula beban domestik sehingga menyebabkan perempuan mengalokasikan lebih banyak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu terus meningkatkan kesempatan kerja bagi perempuan melalui pengembangan sektor industri, UMKM, dan ekonomi digital yang mampu menyerap tenaga kerja perempuan. Selain itu, kebijakan upah minimum perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja perempuan tanpa mengurangi peluang kerja. Pemerintah juga perlu meningkatkan pemerataan layanan kesehatan, terutama di wilayah perdesaan, agar kondisi kesehatan Perempuan dan produktivitas perempuan semakin baik sehingga dapat mendorong peningkatan partisipasi kerja perempuan. Di samping itu, pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan dan pembangunan infrastruktur agar investor lebih mudah masuk ke Jawa Barat dan mampu membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, khususnya perempuan.
2. Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu meningkatkan keterkaitan antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja melalui penguatan program *link and match* antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri, perluasan program magang, pelatihan berbasis kompetensi, serta peningkatan layanan informasi pasar kerja. Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi ketidaksesuaian (*mismatch*) antara tingkat pendidikan perempuan dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga perempuan yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi terdorong untuk lebih aktif berpartisipasi dalam angkatan kerja.
3. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga perlu memperhatikan tingginya *dependency ratio* yang berdampak negatif terhadap TPAK perempuan. Upaya yang dapat dilakukan yaitu menyediakan fasilitas penitipan anak yang terjangkau, layanan perawatan lansia, dan mendorong kebijakan kerja fleksibel

4. bagi perempuan agar beban domestik dapat berkurang. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain seperti budaya, status perkawinan, jumlah anak, dan kesempatan kerja agar hasil penelitian mengenai TPAK perempuan menjadi lebih lengkap dan mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abhirama, F. A., Putranti, I. R., & Hanura, M. (2022). Kerja Sama Indonesia-Australia Melalui Program Mampu. *Journal of International Relations Diponegoro*, 8(4), 705-716.
- Ananthy, S. F., Kusuma, A. S., Fairuz, C. D., Syawalita, N., Avianti, D., dan Caroline, F. S. (2025). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Provinsi Riau*.
- Arbianti, S., dan Suchaina. (2025). Peran Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan dan Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan dalam Mengurangi Ketimpangan dan Kemiskinan di Indonesia: Pendekatan Human Capital. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 15(1), 54–64. <https://doi.org/10.35448/jequ>
- Argiani, dan Ayu Arini, G. (2025). Analysis Determinants of Women's Labor Force Participation Rate in the Labor Market of West Nusa Tenggara Province Analisis Determinan Tingkat Partisipasi Wanita Dalam Pasar Tenaga Kerja Di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Ashary, U. I., Jibril Tajibu, M., dan Mustari, B. (2024). *Jurnal Ekonomika dan Dinamika Sosial Tinjauan Penawaran Tenaga Kerja Pada Sektor Informal Di Kepulauan Tertinggal*.
- Aulianhar, H. M., Saleh, M., Kurnia Lestari, E., Fathorrazi, M., Reza Zulfikri, R., Arodha, D., Ekonomi dan Bisnis, F., Jember, U., dan Kalimantan, J. (2025). *Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan, Upah Minimum, Dan Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Tengah* (Vol. 3, Number 1).
- Ayuningtyas, A., dan Sari Islami, F. (2022). *Analisis Perkembangan Penduduk Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Indonesia*. <https://transpublika.co.id/ojs/index.php/Transekonomika>
- Badan Pusat Statistika. (2018a). *Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2018*.
- Badan Pusat Statistika. (2018b). *Statistik Daerah Provinsi Jawa Barat 2018*.
- Badan Pusat Statistika. (2018c). *Tinjauan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018*.
- Badan Pusat Statistika. (2025a). *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, 2024*.
- Badan Pusat Statistika. (2025b). *Tinjauan Ekonomi Provinsi Jawa Barat*.
- Becker, G. S. (1965). A theory of the allocation of time. *The Economic Journal*, 75(299), 493–517. <https://doi.org/10.2307/2228949>

Becker, G. S. (1991). *A treatise on the family* (Enlarged ed.). Cambridge, MA: Harvard University Press.

Cahyantini, A., Pristiyanto, M. E., Lestari, R., Chintya, M. M., Charli, O., Della, M. M., Putri, A., Yosi, M. M., Sari, P., Dita, M. M., Dewi, D., Litualy, J. W., Santi Rande, M. S. T., Patimah, S. E., Loureine, M. M., Sumual, P., dan Syafrinadina, M. F. M. (2024). *EKONOMI DAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA*. <https://gitalentera.com>

Cholifah, N., dan Sutrisno. (2024). Analysis of Determinants Influencing The Labor Force Participation Rate (LFPR) of Women in East Java Province For The Years 2018-2022. *Jambura Equilibrium Journal*, 6(1). <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/equij>

Damayanti, K. (2021). Determinan perempuan bekerja di Jawa Barat. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(1), 55. <https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.428>

Dwi Adika, N., dan Rahmawati, F. (2021). *Analisis Indikator Ketimpangan Gender dan Relevansinya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia*. 4(2), 151–162.

Elfrida, M. C., Andiny, P., dan Hanum, N. (2025). Analisis Tingkat Pengangguran Terbuka, Rata-Rata Lama Sekolah, *Dependency ratio* dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Sumatra Utara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(6), 539–550. <https://doi.org/10.61722/jemba.v2i6.1631>.

Firmansyah, R., dan Purnomo, D. (2024). Determinants of women's labor participation rate: Evidence in ASEAN. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 4(2), 103–116. <https://doi.org/10.53088/jerps.v4i2.974>

Fitriana, A. P., Anggraini, T., Fadila, D., Pambudi, G. S., Hamtina, M. R., Lestari, S., & Prihartanti, N. (2022). Konflik kerja keluarga pada tenaga kesehatan perempuan selama masa pandemi Covid-19. *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan*, 13(3), 365–376. DOI: 10.26740/jppt.v13n3.p365-376.

Gjorgjiev, M., Atanasovska, J., dan Krstevski, A. (2024). EVOLUTION OF WAGE THEORIES. In *KNOWLEDGE-International Journal* (Vol. 67, Number 1).

Guszalina, S., Kornita, S. E., dan Maulida, Y. (2022). *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Perempuan Di Provinsi Riau*.

Hasti, A. D., dan Destiningsih, R. (2022). *Analisa Determinasi TPAK di Jawa Tahun 2015-2019*. <http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora>

Kaur, M., dan Parneet. (2025). *Empowering Women: Exploring the Dynamics of Female Employment, Literacy and Dependency ratio in Indian States*. <https://doi.org/10.51583/IJLTEMAS>

- Kholifaturrohmah, R., Floresti, D. A., Mayasari, V., dan Rosiana, M. (2022). Kontribusi Human Capital Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan. In *Bisnis dan Akuntansi (JEBA)* (Vol. 24).
- Maulana, R., Sambodo, H., dan Binardjo, G. (2022). *Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja di pulau Jawa*. <https://doi.org/10.29264/jfor.v24i3.11499>
- Melati Wulandari, dan Suwandono, A. (2025). Ikrar Talak dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Klasik: Analisis Komparatif. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 294–306. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i3.2082>
- Mincer, J. (1962). *Labor Force Participation of Married Women: A Study of Labor Supply*. In *Aspects of Labor Economics*. Princeton University Press.
- Miranti, R., Sulistyaningrum, E., & Mulyaningsih, T. (2022). Women's roles in the Indonesian economy during the COVID-19 pandemic: Understanding the challenges and opportunities. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 58(2), 109–139. doi:10.1080/00074918.2022.2105681.
- Moser, C. O. N. (1993). *Gender planning and development: Theory, practice and training*. Routledge.
- Napitulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., dan Harianja, H. (2022). *BUKU BAB 3 Napitulu*.
- Nermelita, K., Nurhapijah Sihombing, Syahrina Aisyah Lubis, dan Tukma Putri Romaito Tanjung. (2025). Peran Strategis Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan dan Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi: Membangun Human Capital untuk Masa Depan. *PPIMAN Pusat Publikasi Ilmu Manajemen*, 3(1), 291–298. <https://doi.org/10.59603/ppiman.v3i1.707>
- Norhikmah, P., Farid, F. M., dan Lestia, A. S. (2022). *Pemodelan Regresi Data Panel Pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Di Provinsi Kalimantan Selatan*.
- Novlitha, E., dan Hasan, Y. S. (2023). Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan Dan Upah Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Tpak) Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Oikos-Nomos*, 16, 2023.
- Nursan, M., dan Anwar. (2025). *Buku Ajar Analisis Regresi Data Panel Dengan Aplikasi EviewS*. <https://pustakabangsa.com/>
- Permata Cita, F., Suwardi, D., dan Mujiburrahmat. (2020). *Analisis Penawaran Tenaga Kerja Wanita Migran Kabupaten Sumbawa* (Vol. 4, Number 1). <http://jurnal.uts.ac.id>

- Pertiwi, E., Purnagunawan, R. M., Hadiyanto, F., dan Alyasa, F. M. (2025). Personal Capital and Female Labor Force Participation in Indonesia: A Probit Analysis of Urban–Rural Contrasts. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 14(2), 383–395. <https://doi.org/10.23887/jish.v14i2.95599>
- Putri, A., Fardani, M., Ignasha, N., Farliana, N., Nurkomala, dan, dan Chairunnisa, A. (2025). Pengaruh Gender Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Tpak) Pada Provinsi Di Indonesia Tahun 2023. In *Pengaruh Gender terhadap*
- Sajati, W. K., dan Pujiati, A. (2025). Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Susilawati, S. A., dan Perwithosuci, W. (2025). *Female Labor Force Participation in Indonesia: The Role of Education, Wage, and Health*.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
1.	Argiani, Gst Ayu Arini (2025)	Analisis Determinan Tingkat Partisipasi Wanita Dalam Pasar Tenaga Kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Variabel Independen: 1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan 2. Upah 3. Wanita mengurus rumah tangga 4. Inflasi Variabel Dependen: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Model regresi linear berganda dengan metode Ordinary Least Squares (OLS)	Hasil pengujian parsial, menunjukkan bahwa Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita, sementara inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan. Selanjutnya, upah tenaga kerja wanita berpengaruh negatif tidak signifikan, dan wanita mengurus rumah tangga berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita dalam pasar tenaga kerja di Nusa Tenggara Barat.
2.	Cristin Elfrida Manurung, Asnidar, Puti Andiny, Nurlaila Hanum, Safuridar (2025)	Analisis Tingkat Pengangguran Terbuka, Rata-Rata Lama Sekolah, <i>Dependency ratio</i> dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Sumatra Utara	Variabel Independen: 1. Tingkat Pengangguran Terbuka 2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan 3. <i>Dependency ratio</i> 4. Upah Minimum Variabel Dependen: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Regresi linear berganda	Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka dan <i>dependency ratio</i> memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Sementara itu, variabel rata-rata lama sekolah dan upah minimum provinsi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap TPAK karena memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.
3.	Sukma Ayu Susilawati,	Female Labor Force	Variabel Independen:	Data panel	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Model

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
	Winny Perwithosuci (2025)	Participation in Indonesia: The Role of Education, Wage, and Health	1. Keterlibatan Perempuan di Parlemen 2. Kepala Rumah Tangga Perempuan 3. Upah Minimum Provinsi 4. Rata-rata lama sekolah 5. Angka Harapan Hidup Variabel Dependen: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	dengan model Fixed Effect Model (FEM)	Fixed Effect (FE) adalah yang paling tepat. Rata-rata Lama Sekolah Perempuan secara negatif dan signifikan mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja mereka. Upah Minimum Provinsi dan Keterlibatan Perempuan di Parlemen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan. Sementara itu, baik Kepala Rumah Tangga Perempuan maupun Harapan Hidup Perempuan tidak secara signifikan memengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan.
4.	Sindy Febriana Ananthy, Airlangga Surya Kusuma, Cantika Deanda Fairuz, Naia Syawalita, Dina Avianti, Fadiah Syifa Caroline (2025)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Provinsi Riau	Variabel Independen: 6. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan 7. Upah 8. Usia Produktif Variabel Dependen: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan berpengaruh signifikan terhadap TPAK Perempuan, sedangkan variabel UMP dan UPP tidak memiliki pengaruh signifikan.
5.	Elita Pertiwi, Raden Muhamad Purnagunawan, Ferry Hadiyanto, Faisal Madjid Alyasa (2025)	Personal Capital and Female Labor Force Participation in Indonesia: A Probit Analysis of Urban–Rural Contrasts	Variabel Independen: 1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan 2. Keterampilan 3. Angka Harapan	Model Regresi Probit	Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di Indonesia ditentukan oleh interaksi kompleks antara Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan, keterampilan TIK, Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan, kebutuhan rumah tangga, peluang struktural,

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
			Hidup (AHH) Perempuan 4. Status Perkawinan 5. Beban pengasuhan anak Variabel Dependen: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		dan nilai-nilai keluarga, di mana Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan menunjukkan pola non-linear berbentuk U dengan partisipasi terendah pada tingkat menengah terutama di pedesaan, namun meningkat ketika didukung keterampilan digital dan tingkat Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan lebih tinggi di sisi lain, Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan mental dan kognitif berperan positif, sementara status perkawinan dan beban pengasuhan anak menjadi hambatan utama, meski dukungan antar generasi dalam rumah tangga dapat meringankan beban domestik dan meningkatkan partisipasi
6.	Wulan Kurniasari, Ida Budiarty, Asih Murwiati (2025)	Economic and Health Dimension of Female Labor Force Participation in Indonesia	Variabel Independen: 1. Upah 2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan 3. Perempuan yang sudah menikah 4. Fertility rate 5. Female-Headed Households Variabel Dependen: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Data panel dengan model Fixed Effect Model (FEM)	Partisipasi angkatan kerja perempuan (FLFP) di Indonesia terutama dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial, di mana Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan memiliki dampak positif yang sangat kuat dalam mendorong perempuan untuk bekerja, sementara upah justru berhubungan negatif karena pertimbangan biaya tenaga kerja dan adanya bias di pasar kerja. Selain itu, pernikahan dini terbukti menjadi hambatan signifikan bagi partisipasi perempuan karena menurunkan akses Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan dan peluang kerja, sedangkan variabel seperti kepala rumah tangga perempuan dan tingkat fertilitas tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
7.	Nurul Cholifah, Sutrisno (2024)	Analysis of Determinants Influencing the Labor Force Participation Rate (LFPR) of Women in East Java Province for The Years 2018-2022	Variabel Independen: 1. Pengeluaran perkapita 2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan 3. Upah 4. PDRB Variabel Dependen: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa model terbaik adalah Fixed Effect Model. Secara parsial, pengeluaran per kapita perempuan (X1) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (Y). Rata-rata lama sekolah perempuan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (Y). Upah minimum kabupaten/kota (X3) berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (Y). Produk Domestik Regional Bruto (X4) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (Y).
8.	Amirull Dwi Hasti, Rian Destiningsih (2022)	Analisa Determinasi TPAK di Jawa Tahun 2015-2019	Variabel Independen: 1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan 2. Upah 3. <i>Dependency ratio</i> Variabel Dependen: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Data panel dengan model Fixed Effect Model (FEM)	Hasil bahwa Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan dan <i>dependency ratio</i> memiliki pengaruh positif yang signifikan, serta upah minimum regional memiliki pengaruh negative yang tidak signifikan dengan TPAK di Daerah Jawa tahun 2015-2019.
9.	Andini Ayuningtyas, Fitrah Sari Islami (2022)	Analisis Perkembangan Penduduk Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Indonesia	Variabel Independen: 1. Tingkat Fertilitas 2. <i>Dependency ratio</i> 3. Pengeluaran	Teknik analisis time-series dengan alat analisis ARDL Error	variabel fertilitas dalam jangka pendek memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap TPAK. Pada variabel <i>Dependency ratio</i> dalam jangka pendek berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPAK.

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
			pemerintah Variabel Tingkat Angkata Kerja Dependen: Partisipasi	Correction Model	Variabel pengeluaran pemerintah dalam jangka pendek memiliki pengaruh yang bernilai positif dan signifikan. Dalam jangka Panjang variable fertilitas, <i>dependency ratio</i> dan pengeluaran pemerintah tidak memiliki pengaruh atau tidak signifikan terhadap partisipasi Angkatan kerja.
10.	Rizky Maulana, Herman Sambodo, Goro Binardjo (2022)	Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja di pulau Jawa	Variabel Independen: 1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan 2. Upah 3. Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan Variabel Tingkat Angkata Kerja Dependen: Partisipasi	Data panel dengan model Fixed Effect Model (FEM)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja, sedangkan rata-rata upah minimum (X2) dan rata-rata angka harapan (X3) hidup memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja.

Lampiran 2. Data Penelitian

Kabupaten	Tahun	X1	X2	X3	X4	Y
Bogor	2018	Rp3,483,667.39	7.28	72.77	49.14	39.82
Bogor	2019	Rp3,763,405.88	7.70	72.91	48.96	44.98
Bogor	2020	Rp4,083,670.00	7.71	73.06	41.54	43.62
Bogor	2021	Rp4,217,206.00	7.79	73.25	41.38	43.31
Bogor	2022	Rp4,217,206.00	8.00	73.54	41.29	41.27
Bogor	2023	Rp4,520,212.25	8.03	73.96	41.26	42.17
Bogor	2024	Rp4,579,541.00	8.05	74.21	41.32	45.57
Sukabumi	2018	Rp2,583,556.63	6.56	72.40	52.11	37.81
Sukabumi	2019	Rp2,791,016.23	6.80	72.63	51.97	40.02
Sukabumi	2020	Rp3,028,531.71	6.81	72.87	44.26	40.61
Sukabumi	2021	Rp3,125,444.72	6.84	73.13	44.19	45.14
Sukabumi	2022	Rp3,125,444.72	6.85	73.47	44.18	51.77
Sukabumi	2023	Rp3,351,883.19	7.08	73.88	44.23	48.52
Sukabumi	2024	Rp3,384,491.00	7.09	74.11	44.36	53.44
Cianjur	2018	Rp2,162,366.91	6.48	71.62	52.13	34.24
Cianjur	2019	Rp2,336,004.97	6.52	71.83	51.97	46.40
Cianjur	2020	Rp2,534,798.99	6.71	72.03	45.88	50.31
Cianjur	2021	Rp2,534,798.99	6.72	72.23	45.91	49.86
Cianjur	2022	Rp2,699,814.40	6.73	72.50	45.97	53.01
Cianjur	2023	Rp2,893,229.10	6.75	72.81	46.04	54.20
Cianjur	2024	Rp2,915,102.00	6.93	72.98	46.16	55.61
Bandung	2018	Rp2,678,028.98	8.28	75.14	49.53	41.88
Bandung	2019	Rp2,893,074.71	8.49	75.23	49.38	48.01
Bandung	2020	Rp3,139,275.37	8.71	75.34	45.55	44.19
Bandung	2021	Rp3,241,929.67	8.82	75.52	45.06	46.73
Bandung	2022	Rp3,241,929.67	8.83	75.81	44.55	45.76
Bandung	2023	Rp3,492,465.99	8.93	76.20	44.09	49.19
Bandung	2024	Rp3,527,967.00	9.03	76.44	43.73	51.26
Tasikmalaya	2018	Rp1,920,937.99	6.86	70.89	52.55	46.41
Tasikmalaya	2019	Rp2,075,189.31	6.86	71.13	52.48	49.63
Tasikmalaya	2020	Rp2,251,787.92	7.04	71.39	45.38	54.65
Tasikmalaya	2021	Rp2,251,787.92	7.33	71.59	45.37	51.47
Tasikmalaya	2022	Rp2,326,772.46	7.58	71.88	45.42	52.02
Tasikmalaya	2023	Rp2,499,954.13	7.83	72.21	45.56	52.39
Tasikmalaya	2024	Rp2,535,204.00	7.84	72.41	45.84	53.26
Ciamis	2018	Rp1,604,334.37	7.31	73.22	49.27	48.37
Ciamis	2019	Rp1,733,162.42	7.51	73.46	49.26	51.17
Ciamis	2020	Rp1,880,654.54	7.52	73.72	45.80	57.47
Ciamis	2021	Rp1,880,654.54	7.63	73.91	46.18	53.92
Ciamis	2022	Rp1,897,867.14	7.84	74.20	46.60	52.27
Ciamis	2023	Rp2,021,657.42	7.89	74.63	47.08	51.47
Ciamis	2024	Rp2,089,464.00	7.90	74.94	47.65	55.64
Kuningan	2018	Rp1,606,030.12	7.08	74.95	50.83	37.79
Kuningan	2019	Rp1,734,994.34	7.10	75.18	50.82	40.47
Kuningan	2020	Rp1,882,642.36	7.28	75.42	46.21	45.20
Kuningan	2021	Rp1,882,642.36	7.54	75.61	46.25	45.41

Kabupaten	Tahun	X1	X2	X3	X4	Y
Kuningan	2022	Rp1,908,102.17	7.62	75.87	46.27	42.64
Kuningan	2023	Rp2,010,734.30	7.63	76.22	46.32	41.65
Kuningan	2024	Rp2,074,666.00	7.64	76.42	46.46	50.85
Cirebon	2018	Rp1,873,701.81	6.29	73.55	47.16	41.85
Cirebon	2019	Rp2,024,160.07	6.36	73.70	47.07	47.70
Cirebon	2020	Rp2,196,416.09	6.63	73.87	40.87	46.77
Cirebon	2021	Rp2,269,556.75	6.66	74.07	41.34	48.48
Cirebon	2022	Rp2,279,982.77	6.97	74.37	41.81	48.20
Cirebon	2023	Rp2,430,780.83	7.21	74.83	42.28	47.86
Cirebon	2024	Rp2,517,730.00	7.22	75.15	42.78	51.86
Majalengka	2018	Rp1,658,514.54	6.45	71.60	48.21	46.92
Majalengka	2019	Rp1,791,693.26	6.54	71.88	48.19	52.02
Majalengka	2020	Rp1,944,166.36	6.73	72.18	42.75	54.77
Majalengka	2021	Rp2,009,000.00	6.88	72.37	43.00	54.22
Majalengka	2022	Rp2,027,619.04	7.08	72.68	43.30	49.52
Majalengka	2023	Rp2,180,602.90	7.20	73.08	43.64	52.24
Majalengka	2024	Rp2,257,871.00	7.21	73.34	44.04	54.11
Sumedang	2018	Rp2,678,028.99	7.89	70.17	47.76	40.94
Sumedang	2019	Rp2,893,074.72	8.04	74.15	47.78	44.49
Sumedang	2020	Rp3,139,275.37	8.33	74.30	45.77	54.74
Sumedang	2021	Rp3,241,929.67	8.34	74.49	45.75	55.10
Sumedang	2022	Rp3,241,929.67	8.45	74.78	45.79	47.42
Sumedang	2023	Rp3,471,134.10	8.48	75.35	45.90	50.07
Sumedang	2024	Rp3,504,308.00	8.49	75.70	46.12	54.65
Indramayu	2018	Rp1,960,301.47	5.27	73.01	44.62	42.95
Indramayu	2019	Rp2,117,713.68	5.28	73.26	44.51	50.00
Indramayu	2020	Rp2,297,931.11	5.53	73.52	39.60	51.83
Indramayu	2021	Rp2,373,073.46	5.77	73.72	39.99	53.70
Indramayu	2022	Rp2,391,567.15	6.12	74.04	40.40	52.98
Indramayu	2023	Rp2,541,996.72	6.36	74.52	40.83	44.53
Indramayu	2024	Rp2,623,697.00	6.37	74.83	41.26	48.21
Purwakarta	2018	Rp3,445,616.90	7.47	73.52	49.05	42.47
Purwakarta	2019	Rp3,722,299.94	7.64	72.70	48.93	42.65
Purwakarta	2020	Rp4,039,067.66	7.65	72.89	44.03	39.05
Purwakarta	2021	Rp4,173,568.61	7.66	73.08	44.14	42.55
Purwakarta	2022	Rp4,173,568.61	7.68	73.37	44.27	46.35
Purwakarta	2023	Rp4,464,675.02	7.69	73.78	44.42	46.68
Purwakarta	2024	Rp4,499,768.00	7.70	74.04	44.59	46.19
Karawang	2018	Rp3,919,291.19	6.73	73.69	44.72	43.49
Karawang	2019	Rp4,234,010.27	6.77	73.85	44.61	43.22
Karawang	2020	Rp4,594,324.54	6.96	74.03	41.25	44.29
Karawang	2021	Rp4,798,312.00	6.97	74.21	41.35	44.47
Karawang	2022	Rp4,798,312.00	7.22	74.50	41.47	45.19
Karawang	2023	Rp5,176,179.07	7.48	74.97	41.60	40.28
Karawang	2024	Rp5,257,834.00	7.49	75.29	41.75	43.48
Bekasi	2018	Rp3,837,939.63	8.34	75.25	43.04	38.00
Bekasi	2019	Rp4,246,126.18	8.34	75.39	42.88	43.18
Bekasi	2020	Rp4,498,961.51	8.62	75.50	40.04	44.54

Kabupaten	Tahun	X1	X2	X3	X4	Y
Bekasi	2021	Rp4,791,843.90	8.82	75.63	40.03	50.49
Bekasi	2022	Rp4,791,843.90	9.07	75.87	39.94	45.24
Bekasi	2023	Rp5,137,575.44	9.17	76.23	39.81	42.05
Bekasi	2024	Rp5,219,263.00	9.34	76.55	39.71	44.34
Bandungbarat	2018	Rp2,683,277.45	7.65	73.92	51.60	37.76
Bandungbarat	2019	Rp2,898,744.63	7.81	74.05	51.49	40.46
Bandungbarat	2020	Rp3,145,427.79	7.82	74.20	44.54	36.58
Bandungbarat	2021	Rp3,248,283.28	7.83	74.39	44.37	40.20
Bandungbarat	2022	Rp3,248,283.28	7.85	74.67	44.27	42.71
Bandungbarat	2023	Rp3,480,795.40	7.86	75.23	44.22	45.55
Bandungbarat	2024	Rp3,508,677.00	7.87	75.56	44.25	48.84
Pangandaran	2018	Rp1,558,793.94	7.39	72.74	46.93	67.74
Pangandaran	2019	Rp1,714,673.33	7.40	73.01	46.91	61.65
Pangandaran	2020	Rp1,860,591.33	7.44	73.29	44.04	63.85
Pangandaran	2021	Rp1,860,591.33	7.55	73.48	44.58	62.18
Pangandaran	2022	Rp1,884,364.08	7.73	73.77	45.14	71.82
Pangandaran	2023	Rp2,018,389.00	7.77	74.22	45.74	70.98
Pangandaran	2024	Rp2,086,126.00	7.88	74.46	46.44	69.11
KotaBogor	2018	Rp3,557,146.66	9.90	75.05	42.11	46.08
KotaBogor	2019	Rp3,842,785.54	9.92	75.25	41.99	45.30
KotaBogor	2020	Rp4,169,806.58	9.93	75.44	42.70	42.87
KotaBogor	2021	Rp4,169,806.58	10.12	75.65	42.47	45.26
KotaBogor	2022	Rp4,330,249.57	10.23	75.96	42.28	47.66
KotaBogor	2023	Rp4,639,429.39	10.24	76.37	42.15	46.32
KotaBogor	2024	Rp4,813,988.00	10.36	76.69	42.13	50.69
KotaSukabumi	2018	Rp2,158,430.53	8.99	73.98	46.86	39.39
KotaSukabumi	2019	Rp2,331,752.50	9.22	74.13	46.76	43.62
KotaSukabumi	2020	Rp2,530,182.63	9.23	74.28	45.37	38.39
KotaSukabumi	2021	Rp2,530,182.63	9.44	74.44	45.30	41.62
KotaSukabumi	2022	Rp2,562,434.01	9.79	74.72	45.25	44.91
KotaSukabumi	2023	Rp2,893,229.10	10.09	75.25	45.25	43.80
KotaSukabumi	2024	Rp2,834,399.00	10.10	75.57	45.34	45.67
KotaBandung	2018	Rp3,091,345.56	10.34	75.93	38.32	45.46
KotaBandung	2019	Rp3,339,580.61	10.39	75.95	38.27	50.85
KotaBandung	2020	Rp3,623,778.91	10.40	75.97	41.74	49.82
KotaBandung	2021	Rp3,742,276.48	10.65	76.16	41.52	50.00
KotaBandung	2022	Rp3,774,860.78	10.66	76.46	41.35	53.37
KotaBandung	2023	Rp4,048,462.69	10.71	76.93	41.26	50.73
KotaBandung	2024	Rp4,209,309.00	10.78	77.24	41.29	51.96
KotaCirebon	2018	Rp1,893,383.54	9.31	73.87	42.72	56.30
KotaCirebon	2019	Rp2,045,422.24	9.31	74.00	42.59	46.24
KotaCirebon	2020	Rp2,219,487.67	9.33	74.13	43.47	49.75
KotaCirebon	2021	Rp2,271,201.73	9.58	74.31	43.43	49.76
KotaCirebon	2022	Rp2,304,943.51	9.84	74.61	43.42	50.56
KotaCirebon	2023	Rp2,456,516.60	10.12	75.20	43.45	55.77
KotaCirebon	2024	Rp2,533,038.00	10.39	75.55	43.59	54.77
KotaBekasi	2018	Rp3,915,353.71	10.86	76.63	36.93	49.83
KotaBekasi	2019	Rp4,229,756.61	10.86	76.67	36.74	49.51

Kabupaten	Tahun	X1	X2	X3	X4	Y
KotaBekasi	2020	Rp4,589,708.90	10.92	76.71	38.90	49.71
KotaBekasi	2021	Rp4,782,935.64	11.11	76.89	39.00	49.11
KotaBekasi	2022	Rp4,816,921.17	11.43	77.18	39.13	46.94
KotaBekasi	2023	Rp5,158,248.20	11.66	77.45	39.29	48.91
KotaBekasi	2024	Rp5,343,430.00	11.79	77.75	39.62	50.63
KotaDepok	2018	Rp3,584,700.29	10.39	76.16	40.07	44.93
KotaDepok	2019	Rp3,872,551.72	10.39	76.29	39.91	48.12
KotaDepok	2020	Rp4,202,105.87	10.70	76.42	41.19	47.57
KotaDepok	2021	Rp4,339,514.73	10.84	76.60	41.03	47.92
KotaDepok	2022	Rp4,377,231.93	11.15	76.91	40.88	47.36
KotaDepok	2023	Rp4,694,493.70	11.28	77.11	40.75	46.99
KotaDepok	2024	Rp4,878,612.00	11.29	77.41	40.83	46.83
KotaCimahi	2018	Rp2,678,028.45	10.62	75.65	40.39	46.00
KotaCimahi	2019	Rp2,893,074.13	10.62	75.71	40.29	46.70
KotaCimahi	2020	Rp3,139,274.74	10.63	75.77	39.91	46.19
KotaCimahi	2021	Rp3,241,929.00	10.71	75.96	39.81	46.05
KotaCimahi	2022	Rp3,272,668.50	10.83	76.26	39.78	48.82
KotaCimahi	2023	Rp3,514,093.25	10.98	76.70	39.82	53.07
KotaCimahi	2024	Rp3,627,880.00	11.22	77.01	39.99	49.99
KotaTasikmalaya	2018	Rp1,931,435.35	8.65	73.67	46.72	43.26
KotaTasikmalaya	2019	Rp2,086,529.61	8.74	73.80	46.61	48.22
KotaTasikmalaya	2020	Rp2,264,093.28	9.00	74.02	45.51	51.47
KotaTasikmalaya	2021	Rp2,264,093.28	9.26	74.21	45.40	51.65
KotaTasikmalaya	2022	Rp2,363,389.67	9.30	74.51	45.31	48.25
KotaTasikmalaya	2023	Rp2,533,341.02	9.31	74.99	45.27	49.94
KotaTasikmalaya	2024	Rp2,630,951.00	9.40	75.32	45.35	54.03
KotaBanjar	2018	Rp1,562,730.28	8.17	72.50	48.07	49.47
KotaBanjar	2019	Rp1,688,217.52	8.18	72.69	48.02	52.61
KotaBanjar	2020	Rp1,831,884.83	8.23	72.89	44.29	55.65
KotaBanjar	2021	Rp1,831,884.83	8.34	73.08	44.63	52.36
KotaBanjar	2022	Rp1,852,099.52	9.51	73.39	45.03	47.38
KotaBanjar	2023	Rp1,998,119.05	8.52	73.84	45.49	50.74
KotaBanjar	2024	Rp2,070,192.00	8.58	74.08	46.05	52.16

Keterangan:

X1 :UpahMinimumKabupaten/Kota

X2 :Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan/Rata-rataLamaSekolahPerempuan

X3 :Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan/AngkaHarapanHidupPerempuan

X4 :Dependency ratio

Y :TingkatPartisipasiAngkatanKerjaPerempuan.

Lampiran 3. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

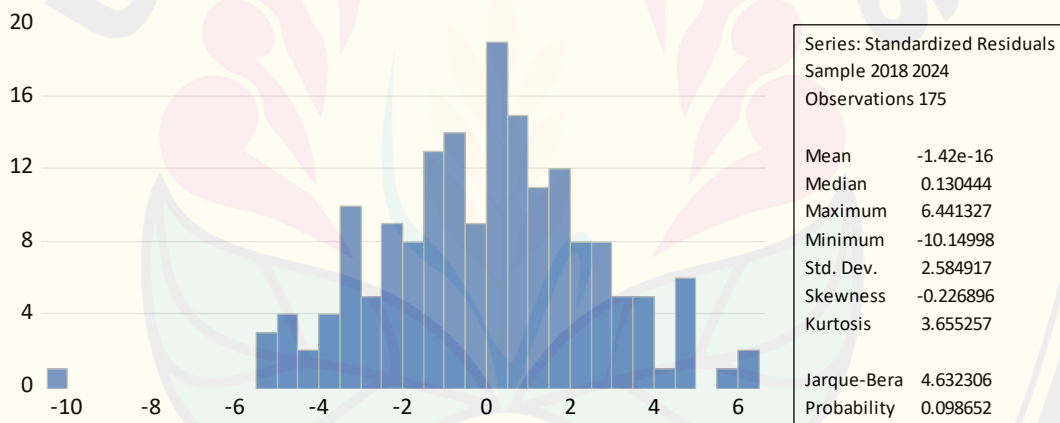
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	19.480205	(24,146)	0.0000
Cross-section Chi-square	251.232495	24	0.0000

Lampiran 4. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	46.077108	4	0.0000

Lampiran 5. Hasil Uji Normalitas



Lampiran 6. Hasil Uji Multikolineritas

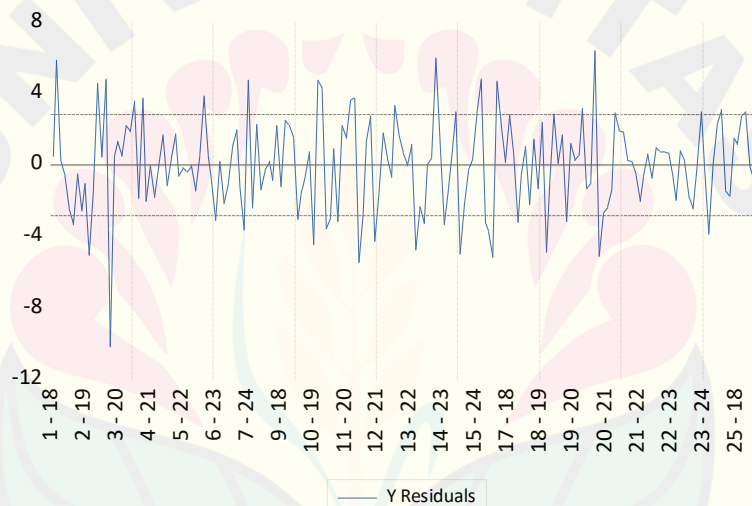
	X1	X2	X3	X4
X1	1.000000	0.454784	0.535800	-0.561422
X2	0.454784	1.000000	0.748139	-0.511129
X3	0.535800	0.748139	1.000000	-0.596326
X4	-0.561422	-0.511129	-0.596326	1.000000

Lampiran 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: ABSRES
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/08/26 Time: 14:22
 Sample: 2018 2024
 Periods included: 7
 Cross-sections included: 25
 Total panel (balanced) observations: 175

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	55.67737	33.44122	1.664932	0.0981
X1	-5.980045	2.955868	-2.023110	0.0449
X2	0.358059	0.737826	0.485289	0.6282
X3	0.453108	0.358119	1.265243	0.2078
X4	-0.032962	0.073174	-0.450463	0.6530

Lampiran 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas metode grafik residual



Lampiran 9. Hasil Uji Autokorelasi

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.816905	Mean dependent var	48.25086
Adjusted R-squared	0.781791	S.D. dependent var	6.040997
S.E. of regression	2.821921	Akaike info criterion	5.062962
Sum squared resid	1162.633	Schwarz criterion	5.587412
Log likelihood	-414.0092	Hannan-Quinn criter.	5.275694
F-statistic	23.26432	Durbin-Watson stat	1.864304
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 10. Hasil Uji Hipotesis

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/08/26 Time: 14:39
 Sample: 2018 2024
 Periods included: 7
 Cross-sections included: 25
 Total panel (balanced) observations: 175

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-274.2965	61.28239	-4.475944	0.0000
X1	14.83692	5.416747	2.739082	0.0069
X2	-4.144016	1.352096	-3.064882	0.0026
X3	2.057666	0.656268	3.135407	0.0021
X4	-0.373994	0.134094	-2.789053	0.0060

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.816905	Mean dependent var	48.25086
Adjusted R-squared	0.781791	S.D. dependent var	6.040997
S.E. of regression	2.821921	Akaike info criterion	5.062962
Sum squared resid	1162.633	Schwarz criterion	5.587412
Log likelihood	-414.0092	Hannan-Quinn criter.	5.275694
F-statistic	23.26432	Durbin-Watson stat	1.864304
Prob(F-statistic)	0.000000		